

*" Melewati Rintang - Membangun Kemandirian Ekonomi -
Memperkuat Gerakan Menuju Perubahan "*



Tutur Perempuan tentang Perjuangan Membangun Kemandirian

*“Melewati Rintang - Membangun Kemandirian Ekonomi –
Memperkuat Gerakan Menuju Perubahan”*

SOLIDARITAS PEREMPUAN
2023

Judul:

Tutur Perempuan tentang Perjuangan Membangun Kemandirian
***“Melewati Rintang - Membangun Kemandirian Ekonomi – Memperkuat
Gerakan Menuju Perubahan”***

Penulis:

Yuni Warlif

Penguatan Organisasi Seknas SP

Editor:

Dinda Nuur Annisaa Yura

Layout dan Desain:

Rima M. Bilaut

Qurrota Aina Kamilah

Cerita Perjuangan Membangun Ekonomi Solidaritas Feminis:

Solidaritas Perempuan Mamut Menteng Kalimantan Tengah

Solidaritas Perempuan Palembang

Solidaritas Perempuan Kinasih, Yogyakarta

Solidaritas Perempuan Palu

Solidaritas Perempuan Sintuwu Raya Poso

SALAM PEMBUKA

Terima kasih pada Tuhan dan semesta, atas segala berkah sehingga tulisan ini bisa diselesaikan dan disajikan di hadapan pembaca. Buku ini disusun sebagai refleksi dari perjalanan panjang Solidaritas Perempuan yang sejak tahun 1990 telah lahir dan berjuang bersama komunitas dan perempuan di tingkat tapak untuk membangun kesadaran kritis dan berjuang untuk melawan penindasan dan ketidakadilan yang tercipta baik oleh sistem yang diciptakan oleh Negara, swasta maupun kelindan patriarki dan agama yang meminggirkan dan memiskinkan perempuan.

Buku ini menceritakan pengalaman-pengalaman kelompok perempuan di komunitas dalam membangun dan mengembangkan gerakan kemandirian di tengah gempuran modernisasi ekonomi yang didominasi oleh para kapitalis yang telah merebut akses masyarakat termasuk perempuan pada sumber-sumber ekonomi. Tanah, hutan dan laut mereka dirampas dan dikuasai dengan rakus dan serakah. Kapitalis atas kuasa negara mengeruk isi perut bumi untuk kepentingan segelintir orang.

Hutan-hutan digunduli dengan dalih alih fungsi hutan untuk tanaman perkebunan. Tegakan hutan yang menjulang tinggi sebagai penyangga kehidupan serta penghasil oksigen untuk penyambung nafas manusia telah runduk ke tanah dan lapuk. Kegagalan mereka tergantikan dengan bentangan tanaman sawit, yang juga telah menghisap rakus air tanah yang mengisi sumur-sumur masyarakat yang berdampak pada sulitnya masyarakat mendapatkan air untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Penghancuran hutan, tanah dan laut mereka secara tidak manusiawi pada akhirnya telah menghilangkan keberadaan dan

mencerabut mereka dari akar dan nilai-nilai luhur yang mereka miliki karena alam dan hutan bukan hanya memiliki nilai ekonomis tapi bagi sebagian besar masyarakat, alam dan hutan mempunyai nilai sosial dan spiritualitas yang menghubungkan mereka pada sang pencipta, sang khalik yang memberi kehidupan.

Dalam buku ini, diketengahkan cerita pengalaman kelompok perempuan dari beberapa komunitas SP dalam membangun dan mengembangkan kemandirian ekonomi dengan dukungan potensi yang ada di wilayah mereka, pengetahuan perempuan dan kearifan lokal yang ada di masyarakat tersebut. Gerakan kolektif ini bukan hanya sekedar berorientasi uang, namun lebih luas dari itu, kelompok dijadikan sebagai ruang aman bagi perempuan, ruang berdiskusi juga sebagai alat perjuangan. Jatuh bangun, gelombang energi dan semangat yang naik turun dalam mewarnai perjuangan mereka tergambarkan dalam cerita-cerita ini.

Ucapan terima kasih dan hormat, saya sampaikan pada perempuan-perempuan hebat yang telah sudi membagikan cerita dan pengalaman berharga mereka agar bisa menginspirasi banyak perempuan yang tengah berjuang untuk mendapatkan hak-hak dan keadilan di tengah zalim dan serakah serta tikam-tikam kapitalis yang tak manusiawi. Kita gaungkan doa pada Tuhan dan semesta agar mereka tetap bersemangat menyalakan obor perjuangan dan perlawanan agar terciptanya kehidupan yang demokratis di muka bumi Indonesia. Panjang umur perjuangan dan selamat membaca.

Penulis



DAFTAR ISI

v *Salam Penulis*

1 *Bagian I*
GURITA KAPITALISME

11 *Bagian II*
**HILANGNYA KEDAULATAN
PEREMPUAN**

20 *Bagian III*
**MEREKA YANG TELAH MEMULAI
PERLAWANAN:**

24 Cerita dari Bumi Tambun Bungai
Kalimantan Tengah

44 Wong Perempuan Sriwijaya yang
Gagah Berani

54 Cerita dari Sai Bumi Ruwa Jurai
Lampung

61 Kabar Perempuan Petani dari
Yogyakarta

69 Sepenggal Cerita dari Bumi Tadulako

75 *Bagian IV*
**FEMINIS EKONOMI SOLIDARITAS
UNTUK KEBERLANJUTAN**

84 *Penutup*
**MERAWAT INISIATIF,
MENGUATKAN PERLAWANAN**





BAGIAN I

GURITA KAPITALISME





Kapitalisme lahir atas buah pikir Adam Smith, seorang tokoh kelahiran Skotlandia pada 5 Juni 1723 yang meletakkan dasar-dasar ekonomi pasar bebas. Pada masa itu, perbankan komersial mulai berkembang. Kapitalisme bisa diartikan sebagai paham yang menganggap bahwa kapital adalah elemen utama dalam sosial ekonomi. Kapitalisme bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dan kesejahteraan dengan menimbun kekayaan yang sebesar-besarnya bagi diri sendiri atau sekelompok orang. Dalam dunia kapitalis, sistem perdagangan, industri dan alat-alat produksi dikendalikan oleh pemilik modal. Hal ini tentu saja bertentangan dengan konstitusi negara Indonesia. Bahwa pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menyebutkan bahwa *“Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.”*

Pasal ini menegaskan bahwa sumber daya alam yang ada di bumi Indonesia seharusnya dikelola dan dimanfaatkan untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, juga sebagai sumber produksi dan sumber ekonomi bagi rakyat, dengan sistem perekonomian kolektif berdasarkan azas kekeluargaan. Pasal ini juga memberikan pemahaman pada kita bahwa tidak boleh ada penguasaan sumber daya alam oleh perseorangan atau pihak-pihak tertentu. Oleh sebab itu praktik-praktik monopoli, oligopoli maupun praktik kartel dalam bidang pengelolaan sumber daya alam adalah bertentangan dengan UUD 1945 khususnya pasal 33 ayat (3).

Namun kenyataannya, pengelolaan sumber daya alam tak lagi menghiraukan amanat konstitusi. Kekayaan alam hanya dimiliki dan dikuasai oleh segelintir orang yang memiliki modal. Untuk

bisa menguasai sumber-sumber ekonomi strategis, pemodal atau kapitalis akan menggunakan tangan negara untuk melahirkan mekanisme dan kebijakan yang melindungi dan berpihak pada mereka. Dengan dalih kemanusiaan dan atas nama pembangunan modern, para kapitalis membentuk koloni untuk mengintervensi negara target melahirkan berbagai kebijakan sebagai pintu masuk untuk menjarah dan merampok kekayaan alam yang sejatinya harus memberikan kesejahteraan pada seluruh rakyat Indonesia, bukan hanya segelintir orang.¹

Undang-undang Penanaman Modal Asing No. 1 /1967 pertama yang disahkan pada April 1967 telah membuka pintu selebar-lebarnya bagi investor asing untuk menancapkan kuku dan taringnya di Indonesia. Dua bulan setelah UUPMA ini disahkan Freeport Sulphur Incorporated menandatangani sebuah kontrak karya untuk mengeksplorasi dan menambang cadangan emas dan tembaga di Papua yang hingga saat ini masih berjalan. Berturut-turut hingga saat ini, negara telah melahirkan berbagai kebijakan yang memperlihatkan keberpihakannya pada kaum kapitalis.

Kebijakan yang masih anyar adalah disahkannya Undang-undang Omnibus law pada rapat paripurna DPR tanggal 3 November 2020. Melalui kebijakan ini negara menjanjikan keluasaan dan kemudahan bagi pemilik modal untuk memulai atau memperpanjang maupun melakukan ekspansi usahanya. Karena memang tujuan utama dari kebijakan ini adalah membuka dan meningkatkan iklim investasi di Indonesia. Oleh sebab itu bagi para investor diberikan kemudahan perizinan berusaha yang terintegrasi secara elektronik. Pengusaha juga tidak harus melakukan kajian dan memiliki AMDAL, cukup hanya sekedar berkomitmen saja untuk menjaga lingkungan tanpa

¹ <https://www.kompasiana.com/agustrisa000/559b3d5c3e23bd01058b4567/cara-kapitalisme-menguasai-dunia?page=all>

memiliki AMDAL proyek sudah bisa dijalankan. Tentu saja, akibat praktik-praktik seperti ini kerusakan lingkungan tak bisa dihindari. Sementara masyarakat tidak bisa mencegah atau menghentikan proyek yang sedang berjalan karena mereka telah dilindungi oleh negara melalui UU Omnibus law tersebut. AMDAL tak bisa lagi menjadi alat kuasa bagi masyarakat untuk mempertahankan kelestarian lingkungannya.

UU Cipta Karya Omnibus law ini hanya memberikan kenikmatan sesaat atau kenikmatan bayangan pada masyarakat. Kesejahteraan melalui dana stimulan yang dikemas dalam bentuk pemberdayaan ekonomi masyarakat seperti dana UMKM (Usaha Kecil Menengah dan Kredit Mikro) hanya bujukan sesaat, dan mereka harus membayar mahal dengan kehilangan berbagai sumber kehidupan yang akan berpindah tangan dan penguasaan pada pemilik modal dengan kemudahan perizinan yang diberikan pada pemodal untuk mengembangkan usahanya dengan pelayanan satu pintu (*one single system*). Undang-undang ini hanya bertujuan untuk menumbuhkan iklim investasi bagi pemilik modal untuk menguasai banyak kekayaan alam negara ini yang mestinya bisa memberikan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Indonesia seperti yang dicantumkan dalam sila kelima Pancasila yaitu *“Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”*

Kehidupan dan sumber-sumber kehidupan mereka akan terancam bahkan bisa hilang. Penghapusan perizinan ekspor-impor yang juga diatur dalam Omnibus law ini juga akan membunuh para petani dan pengusaha kecil. Ekspor produk dalam negeri menjadi sulit karena berbagai kebijakan internasional berkaitan dengan standar mutu produk sementara barang impor dengan mudah menjajah pasar dalam negeri. Berkaitan dengan pemenuhan pangan, import akan dilakukan jika terjadi kekurangan cadangan pangan nasional, tapi

sekarang impor bisa dilakukan meskipun produksi dalam negeri melimpah. Jika hal ini terjadi maka harga-harga produk pertanian bisa turun yang akan membuat petani semakin sulit.

Berbagai kebijakan itulah yang digunakan oleh para pemilik modal untuk menguasai sistem perekonomian dari hulu sampai ke hilir. Kekayaan alam dikuasai dan hak-hak masyarakat dikangangi bahkan dihilangkan. Kearifan lokal juga pengetahuan perempuan tak lagi menjadi acuan bagi masyarakat untuk mengkaryakan diri. Masyarakat dipaksa menggunakan cara lain yang disebut *“modern dan lebih menjanjikan.”* Mereka menjadi tercerabut dari akar dan dari nilai-nilai budaya serta sejarahnya. Mereka yang di pelosok desa sekalipun juga menjadi target dan mangsa pasar produk-produk kapitalis. Semua ruangan dalam setiap rumah masyarakat telah diwarnai produk kapitalis. Tak ada celah yang tak bisa dimasukinya. Melalui iklan di media elektronik dan media cetak serta propaganda melalui media sosial lainnya, masyarakat *“dipaksa”* menjadi konsumtif dan individualis. Pola hidup penuh guyub yang menjadi karakter kuat masyarakat pedesaan telah berubah menjadi lebih konsumtif. Begitulah cara kapitalis menjajah dan menghisap kehidupan manusia di hampir semua belahan dunia

Sistem pembangunan yang eksploitatif dan destruktif, baik skala lokal dan nasional yang dani oleh pihak swasta maupun pemerintah melalui pendanaan Lembaga Keuangan Internasional (LKI) makin massif dilakukan, dan bahkan dikemas dengan Proyek Strategis Nasional (PSN) telah menghilangkan sumber-sumber kehidupan serta ruang-ruang hidup masyarakat khususnya perempuan. Hal ini telah melahirkan kemiskinan berwajah perempuan, karena perempuanlah yang banyak berada dalam lingkaran itu. Mereka tak bisa lagi menggantungkan kehidupan pada hutan dan alam. Hutan dan alam mereka telah dikuasai oleh pemodal dan dikonversi

menjadi berbagai bentuk usaha seperti perkebunan skala besar untuk tanaman monokultur, pertambangan dan lain sebagainya. Mereka tak lagi bisa mengail dan menjala ikan di sungai yang jernih karena kebeningan airnya telah tercemar oleh aktivitas pertambangan dan perkebunan yang menggunakan bahan kimia kuat. Mereka tak lagi bisa berbangga dengan kemampuan mengembangkan varietas-varietas lokal yang mereka miliki, karena benih telah dikuasai sekelompok orang yang menguasai pasar benih.

Masyarakat marjinal khususnya perempuan tak bisa lagi hidup dalam damai dan sejahtera. Sumber daya yang mereka miliki dan menjadikan mereka berdaulat sudah tak ada lagi. Kemelut ini akan berujung pada terancamnya kedaulatan pangan masyarakat termasuk di dalamnya perempuan. Kapitalis telah memainkan jerat guritanya dari hulu sampai ke hilir. Semua sektor sudah dikuasai dan melemahkan serta meminggirkan kaum marjinal. Kedaulatan hanya tinggal mimpi dan kenangan karena semua sumber kekuasaan masyarakat sudah dirampas. Karena kedaulatan butuh dukungan banyak faktor, tak akan ada kedaulatan pangan tanpa kedaulatan benih dan kedaulatan tanah. Pangan – benih – lahan adalah bagian yang tak terpisahkan dan modal utama untuk mewujudkan kedaulatan yang saat ini telah dikuasai dan dimonopoli segelintir orang.

Vandana Shiva, seorang aktivis lingkungan asal India mengatakan bahwa dalam benih dan tanah, kita bisa menemukan setiap jawaban dari krisis yang kita hadapi. Baik krisis kekerasan dan perang, krisis kelaparan dan penyakit ataupun krisis kehancuran demokrasi. Tentu saja menjadi sulit bagi kita untuk membenahi semua krisis itu kalau kuncinya sudah tidak kita pegang lagi, yakni benih dan tanah. Benih dan tanah adalah sumber kehidupan bagi masyarakat

Kapitalis menciptakan pembangunan yang tidak partisipatif, menghilangkan akses dan kontrol perempuan terhadap sumber kehidupannya. Kelindan antara patriarki, sistem negara dan kapitalis telah meletakkan perempuan pada posisi ketidakberdayaan sehingga ketimpangan kuasa antara laki-laki dan perempuan semakin tajam. Juga ketimpangan antara pemilik modal dengan kaum marginal. Sementara masyarakat terus-menerus diperhadapkan dengan konflik yang bahkan berujung pada kriminalisasi saat mereka memperjuangkan hidup dan sumber kehidupannya. Namun pemerintah tak bergeming melihat situasi ini. Di ruang-ruang ber AC dan fasilitas mewah yang dibiayai oleh cucur keringat dan darah rakyat, mereka sibuk bersidang dan membahas kebijakan untuk menguatkan pondasi kapitalis dan memiskinkan masyarakat yang tentu saja juga memberikan keuntungan pada elit-elit negara ini.

Sistem kapitalis yang dikuatkan oleh kebijakan negara dengan dominasi pengetahuan versi pemerintah telah memunculkan paradigma pembangunan yang patriarkis dengan sangat brutal dan semena-mena menghancurkan harmonisasi antara manusia dan alam yang semestinya tetap saling menopang untuk menjaga keberlangsungan kehidupan. Kerusakan ekologi melalui industri ekstraktif di segala sektor telah menyebabkan terjadinya ketidakseimbangan alam yang berdampak pada ketidakmampuan alam menyediakan sumber kehidupan bagi manusia yang akhirnya berujung pada bencana. Sementara kaum perempuan dan masyarakat yang menggantungkan kehidupannya pada pola subsisten seperti petani yang berhuma dan berburu mengalami pemiskinan dan akhirnya benar-benar menjadi miskin.²

Situasi ini akan berdampak pada kehidupan perempuan yang

²<http://readersblog.mongabay.co.id/rb/2016/04/23/perempuan-dan-lingkungan-memahami-bumi-sebagai-kerahiman-suatu-upaya-untuk-kembali-pulang-ke-rahim-ibu-pertiwi/>

semakin sulit. Perempuan akan mengalami beban kehidupan yang semakin berat. Dalam situasi sulit, memang laki-laki dan perempuan sama-sama terdampak, namun karena peran gender yang dilekatkan pada perempuan dalam pandangan patriarki, telah memaksa perempuan mengambil tanggung jawab lebih banyak dari laki-laki untuk memenuhi kehidupan keluarga. Akibat situasi ini banyak di antara mereka yang terpaksa memilih bekerja keluar negeri untuk menjadi buruh migran dengan jaminan perlindungan yang juga minim dari negara. Banyak diantara mereka menjadi korban trafficking dan dijadikan komoditas untuk mengeruk keuntungan oleh mafia-mafia perdagangan orang. Yang lebih tragisnya nasib mereka yang berakhir dengan kehilangan nyawa.

Pilihan menjadi buruh migran terpaksa diambil karena sudah tak ada lagi yang bisa diharapkan di kampung halaman untuk bisa memenuhi kebutuhan hidup. Pekerjaan yang bisa dilakukan dan tersedia bagi perempuan di luar negeri adalah di sektor informal atau domestik sebagai Pekerja Rumah Tangga PRT. Alih-alih mendapatkan uang di luar negeri, yang mereka terima justru penyiksaan dan berbagai pelanggaran hak. Naasnya banyak yang kembali ke kampung halaman dalam keadaan sakit bahkan sudah dalam peti jenazah. Namun cerita pilu para buruh migran di luar negeri ini tak menghalangi niat yang lain untuk berangkat. Rasa takut dan khawatir terkalahkan dengan keinginan untuk memperbaiki ekonomi keluarga, walaupun cerita duka buruh migran selalu menghiasi laman media massa dan televisi, mulai dari mengalami kekerasan seksual yang dialami, dipenjara, gaji tak dibayar bahkan hingga ajal yang berakhir di tiang gantungan atau di tangan algojo.

Industri eksploitatif dan destruktif juga telah berdampak pada berbagai bencana di beberapa wilayah Indonesia. Di akhir tahun 2018 duka mendalam bagi bangsa, berturut-turut terjadi gempa

di Mataram, Sumbawa, Palu, Lampung dan Selat Sunda. Di Palu, gempa diiringi tsunami dan likuifaksi. Gempa yang diiringi tsunami di selat Sunda telah berimbas ke wilayah Banten dan Lampung. Bencana ini telah menimbulkan ribuan korban jiwa dan kerugian harta benda.

Di samping itu, industri eksploitatif dan destruktif ini juga mempercepat laju perubahan iklim dan pengrusakan bumi dan daya dukungnya. Daya dukung ini erat hubungannya dengan bencana ekologis yang terjadi. Dengan hilangnya daya dukung, bumi tidak bisa menahan kekuatan bencana yang terjadi. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat sepanjang tahun 2021 telah terjadi 5,402 bencana yang mayoritasnya atau 99,5% merupakan bencana hidrometeorologi.³ Kejadian bencana tersebut di antaranya 1794 bencana banjir, 1577 cuaca ekstrem, 1321 bencana tanah longsor, 579 kebakaran hutan dan lahan, 91 kejadian gelombang pasang dan abrasi, 24 kali gempa bumi, 15 bencana kekeringan dan 1 kali erupsi gunung berapi.⁴ Hal ini tentu saja berhubungan dengan pola pembangunan yang tidak memperhatikan kaidah konservasi dan keberlanjutan ekologi, hanya mengeruk dan mengeksploitasi dengan rakus dan tamak serta meminggirkan kehidupan masyarakat terlebih perempuan.

Pertemuan tahunan Dana Moneter Internasional - Bank Dunia di Bali Oktober 2018 telah menghasilkan 19 komitmen investasi yang disepakati dengan nilai mencapai US\$ 13,6 miliar di berbagai sektor seperti pariwisata, pembangunan infrastruktur dan ekonomi

³[Bencana hidrometeorologi adalah bencana yang diakibatkan oleh aktivitas cuaca seperti siklus hidrologi, curah hujan, temperatur, angin dan kelembapan. Penyebab bencana hidrometeorologi adalah perubahan iklim dan cuaca ekstrem.](#)

⁴[https://www.antaranews.com/berita/2711121/bnpb-catat-5402-kejadian-bencana-terjadi-di-indonesia-sepanjang-2021#:~:text=Jakarta%20\(ANTARA\)%20%2D%20Badan%20Nasional,kejadian%20itu%20merupakan%20bencana%20hidrometeorologi](https://www.antaranews.com/berita/2711121/bnpb-catat-5402-kejadian-bencana-terjadi-di-indonesia-sepanjang-2021#:~:text=Jakarta%20(ANTARA)%20%2D%20Badan%20Nasional,kejadian%20itu%20merupakan%20bencana%20hidrometeorologi)

digital. Kebijakan ini melibatkan Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB), PT Sarana Multi Infrastruktur dan sejumlah perusahaan asing dari China, AS, dan Eropa. Hal ini tentu saja akan berdampak pada banyaknya lahan dan hutan masyarakat yang diambil untuk berbagai proyek ini, akhirnya juga akan berdampak pada kehidupan perempuan karena kehilangan sumber kehidupan dan kehilangan akses, kontrol, dan kedaulatan perempuan atas ruang hidup dan sumber kehidupannya juga konflik di tengah masyarakat. Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) menyebutkan sepanjang tahun 2018 konflik agraria yang terjadi mencapai 410 kasus dengan luasan area konflik 807.177,613 hektar, dan melibatkan sebanyak 87.568 KK (kepala keluarga). Konflik agraria di sektor perkebunan masih tertinggi yaitu 144 kasus dan menyusul pembangunan infrastruktur dan sektor properti, termasuk sektor pariwisata.

Bisa kita bayangkan bagaimana kapitalis menjajah dan melakukan penghisapan pada kehidupan masyarakat di berbagai sektor. Di atas sudah disampaikan bahwa dengan berbagai cara kapitalis bisa hadir dalam banyak wajah, bahkan tak segan menggunakan jubah-jubah agama dan menjual surga untuk membujuk masyarakat dan memuluskan langkahnya. Dari situasi ini masyarakat miskin terutama perempuanlah yang akan merasakan dampak berlebih, karena perempuan selalu dilekatkan oleh patriarki dengan tanggung jawab domestik untuk menjaga dan menyediakan pangan keluarga. Perempuan dimiskinkan secara struktural karena mereka telah kehilangan akses dan kontrol terhadap sumber daya alam dan sumber kehidupan lainnya.

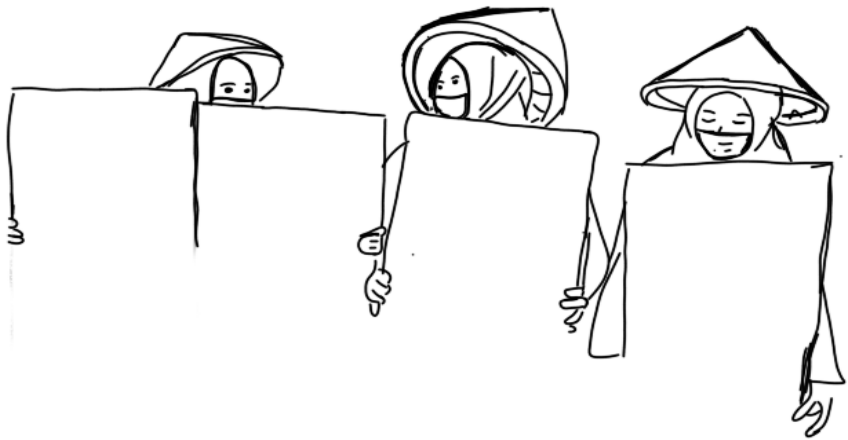
Berkaca dari situasi itu maka perlu dibangun ruang-ruang pengembangan ekonomi untuk mengakomodir kebutuhan perempuan. Pengembangan ekonomi yang dibangun juga harus

memikirkan keberlanjutan dan kelestarian ekologi, budaya, sistem sosial dan kearifan lokal yang ada karena sejatinya pengembangan ekonomi haruslah berbasis pada potensi lokal dan kearifan yang ada di masyarakat. Pengembangan ekonomi yang dibangun juga harus bermuara pada penguatan perempuan marjinal dan memperkuat kelompok perempuan sehingga tercipta kelembagaan ekonomi yang lebih baik, transformatif dan adil gender. Solidaritas Perempuan berpandangan sistem ekonomi yang dibangun di masyarakat harus tumbuh secara organik sesuai potensi yang dimiliki dan kearifan lokal yang ada. Modal sosial adalah modal utama dalam membangun gerakan kemandirian ekonomi kolektif. Gerakan ini juga bisa sebagai alat perjuangan untuk melawan konsep ekonomi kapitalis yang memiskinkan masyarakat marjinal khususnya perempuan.



BAGIAN II

HILANGNYA KEDAULATAN PEREMPUAN





Berdaulat Atas Tanah, Berdaulat Atas Kehidupan

Situasi penghancuran lingkungan dan konflik sumber daya alam terus meningkat atas nama pembangunan dan peningkatan ekonomi. Investasi skala besar semakin merajalela masuk, melakukan eksploitasi, dan mengeruk sumber daya alam Indonesia. Hak sebagai warga negara yang mencakup hal Sipil (Sipil Politik) dan Ekosob (Ekonomi, sosial dan budaya) tidak akan terpenuhi jika kelestarian lingkungan sebagai penyangga utama kehidupan manusia telah dihancurkan melalui proyek-proyek destruktif yang tidak memberikan jaminan pada keberlanjutan lingkungan. Pengrusakan lingkungan ini juga mengancam kedaulatan perempuan atas kehidupannya.

Dengan kehidupannya yang sangat dekat dengan alam, perempuan telah dipinggirkan dari ruang-ruang interaksinya dengan alam raya dan semesta. Patriarki yang juga merasuk ke dalam berbagai kebijakan dan proyek Negara telah mereduksi nilai-nilai sakral antara perempuan dan alam. Laki-laki dianggap memiliki hak dan penentu untuk mengambil keputusan yang berkaitan dengan hutan, dan tanah, Begitulah patriarki dan negara berpendapat, tanpa melihat betapa tinggi dan luhurnya makna tanah dan hutan bagi perempuan. Melalui riset partisipatif berperspektif feminis¹ yang dilakukan oleh Solidaritas Perempuan pada tahun 2017 – 2018 di Takalar (Sulawesi Selatan), Ogan Komering Ilir (Sumatera Selatan), Aceh, dan di Kecamatan Mantangai, Kapuas Kalimantan

¹Metode Feminist Participatory Action Research (FPAR) atau Riset Aksi Partisipatif Berperspektif Feminis menjadi salah satu metode penelitian yang dikembangkan oleh Solidaritas Perempuan dalam beberapa konteks yang menjadi mandat organisasi. Metode ini tidak hanya menjadikan perempuan sebagai subjek yang melakukan penelitian, tetapi juga menjadi ruang untuk penguatan perempuan, serta membangun strategi kolektif untuk advokasi dan aksi-aksi lainnya.

Tengah, telah menggambarkan bahwa tanah bagi perempuan bukan hanya sebagai sumber ekonomi dan sumber penghidupan, tapi juga mempunyai nilai budaya, sosial, spiritualitas dan investasi masa depan yang bisa diwariskan.²

Namun saat ini perempuan ditempatkan sebagai kelompok yang tidak berdaya dan tidak punya pengetahuan sehingga sering terabaikan dan tidak dilibatkan dalam proses-proses pengambilan keputusan yang berhubungan dengan tanah dan hutan, serta kekayaan alam lainnya. Keterbatasan perempuan untuk bisa mengakses sumber-sumber informasi maupun ruang-ruang pengambilan keputusan mengakibatkan perempuan tidak memiliki ruang untuk menyampaikan pendapat dan pengalaman mereka.

Patriarki dan negara telah merampas kedaulatan perempuan atas tanah, begitu juga dengan hutan. Situasi dan kondisi ini berimbas pada hilangnya kedaulatan perempuan atas sumber-sumber kehidupannya. Kedaulatan atas tanah adalah modal utama untuk bisa berdaulat atas pangan. Kedaulatan atas pangan bisa terjadi kalau di masyarakat juga bisa berdaulat atas benih. Karena kedaulatan atas tanah, kedaulatan atas pangan dan kedaulatan atas benih merupakan satu rangkaian yang tak bisa dipisahkan untuk bisa berdaulat atas hidup. Namun “kedaulatan” semakin jauh dari harapan. Tanah, hutan dan kekayaan alam lainnya tak lagi bisa sepenuhnya menjadi penyokong kehidupan masyarakat tak terkecuali perempuan. Pangan-pangan lokal yang menjadi produk dan kebanggaan perempuan sudah jarang tersedia di meja makan atau di dapur rumah mereka, tergantikan oleh makanan-makanan instan buatan pabrik. Mereka sudah tak berdaulat lagi atas pangan karena lahan sebagai tempat tumbuhnya beraneka ragam hayati sumber pangan telah dikuasai oleh perusahaan-perusahaan. Aneka

²FPAR dilaksanakan oleh Seknas SP dan komunitas

ragam flora yang menghidupi telah berganti dengan tanaman monokultur. Bahkan lahan-lahan produktif penghasil pangan di desa telah beralih fungsi menjadi perumahan, infrastruktur dan lain sebagainya.

Petani gurem yang memanfaatkan lahan-lahan sempit untuk menyambung kehidupan tak bisa lagi mengelola lahan dengan kearifan lokal yang mereka miliki. Tanah mereka telah tercemar pupuk dan pestisida kimia produk kapitalis. Perusahaan raksasa telah memiliki lisensi dan hak paten atas bibit, yang kemudian menghegemoni sistem pertanian masyarakat. Pemerintah menjembatani kepentingan kapitalis ini melalui program-program untuk melakukan propaganda, promosi dan memanipulasi pengetahuan agar petani tertarik untuk menggunakan produk-produk perusahaan dan meninggalkan cara-cara tradisional dalam bercocok tanam yang menjadi kekhasan dan cenderung lebih subsisten. Iming-iming produksi tinggi merupakan janji dan mimpi yang bisa di jual pada petani. Namun yang sesungguhnya terjadi, kapitalis melalui pemerintah dengan berbagai program tersebut tengah menciptakan ketergantungan serta menjerat petani, sehingga bisa menguasai pasar dan memperoleh keuntungan sebesar-besarnya. Dari hari ke hari jeratan hutang semakin melilit dan menggurita dan menimbulkan kesengsaraan hidup bagi petani khususnya perempuan

Sementara perampasan tanah dan alih fungsi lahan serta hutan milik masyarakat komunal untuk berbagai pengguna semakin massif terjadi dan selalu dibarengi dengan konflik di masyarakat. Konflik antar masyarakat dengan perusahaan maupun konflik horizontal yang terjadi antar masyarakat akibat perbedaan kepentingan dan pandangan di antara mereka. Dalam kondisi ini, masyarakatlah yang dimiskinkan, hingga akhirnya benar-benar

menjadi miskin karena mereka sudah kehilangan tanah dan hutan.

Akses masyarakat untuk mendapatkan air bersih juga semakin sulit karena sudah tercemar baik oleh limbah perkebunan maupun pertambangan. Aliran sungai yang selama ini menjadi sumber air bersih telah berubah warna menjadi keruh dan mengandung bahan-bahan kimia yang akan merusak kesehatan mereka juga membunuh aneka ragam fauna yang ada di dalamnya. Nutrisi dan hara dalam tanah telah dirusak dan dikotori pupuk berbahan kimia. Selain itu pertanian biodiversitas telah dihancurkan dengan sistem pertanian monokultur. Bahkan masyarakat juga menjadi kesulitan untuk mendapatkan berbagai ramuan obat-obatan tradisional yang sebelumnya tersedia dengan sangat banyak di hutan-hutan sekitar perkampungan mereka. Dampak lanjutannya dari situasi dan kondisi ini adalah beban dan tanggung jawab perempuan semakin bertambah karena patriarki telah menempatkan perempuan sebagai orang yang harus memikul tanggung jawab dalam keluarga.

Lapisan penderitaan dan kesengsaraan yang dialami perempuan semakin berlipat ganda. Tak hanya kehilangan tanah dan hutan, mereka juga diintimidasi dan dikriminalisasi. Penangkapan dengan mudah dilakukan pada mereka yang berjuang dan melawan untuk mempertahankan tanah dan hutannya karena dianggap melawan dan membangkang terhadap rencana “mulia” pemerintah untuk “mensejahterakan masyarakat.” Pemerintah lebih memperhatikan keberpihakannya pada pemodal dan pemilik uang serta mengenyampingkan kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Perampasan tanah atas nama pembangunan dan peningkatan ekonomi telah melahirkan ketimpangan kepemilikan tanah yang sangat tajam di masyarakat. Hutan atau tanah hanya dikuasai oleh segelintir orang untuk memperkaya diri sendiri, sementara masyarakat hanya bisa memanfaatkan sisa-sisa dari keserakahan

penguasa. Ironisnya ancaman kekerasan dan kriminalisasi dengan gampang diarahkan pada mereka hanya karena berjuang mempertahankan hak-hak dan kedaulatannya.

Padahal, dengan jelas UUD 1945 Pasal 33 menegaskan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (ayat 3). Ini menunjukkan bahwa sumber daya alam di Indonesia seharusnya dikuasai, dikelola dan dimanfaatkan untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Pasal ini mengingatkan bahwa tidak boleh ada penguasaan sumber daya alam di tangan perorangan atau sekelompok orang dengan praktik-praktik monopoli.

Dari banyak peristiwa konflik sumber daya alam, perempuan merupakan pihak yang paling terdampak karena tanggung jawab pemenuhan pangan dan urusan domestik lainnya dilekatkan pada tanggung jawab perempuan. Bagi perempuan hutan dan tanah adalah sahabat hidup mereka untuk bisa menjalankan tanggung jawab itu. Ironisnya perempuan tidak banyak dilibatkan ruang-ruang pengambilan keputusan dan bisa menentukan hal apa yang harus dilakukan di atas tanah dan hutan mereka. Padahal perempuan berperan aktif dalam proses pengelolaan lahan, sehingga semestinya harus dilibatkan dalam proses-proses pengambilan keputusan berkaitan dengan pengelolaan tanah, hutan dan sumber daya alam lainnya. Pengalaman perempuan sesungguhnya merupakan pengetahuan penting, sehingga perempuan seharusnya dapat turut menyuarakan kepentingan dan kebutuhan mereka, yang seringkali juga merupakan kebutuhan keluarga maupun masyarakat yang lebih luas.

Hilangnya Kearifan Lokal Dan Nilai-nilai Sosial

Pembangunan patriarki yang destruktif dan ekstraktif yang selama ini dipraktikkan oleh Negara, telah menghilangkan sistem dan pola pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan yang banyak dipraktikkan oleh masyarakat. Pola ini dengan nyata telah merusak sistem dan nilai-nilai sosial termasuk kearifan lokal masyarakat.

Selain itu bagi masyarakat khususnya Masyarakat Adat, tanah merupakan sumber identitas dan budaya yang sama pentingnya dengan sumber ekonomi. Kehilangan tanah sama artinya menceraibera mereka dari akar budaya dan identitas diri mereka. Penggusuran dan pemindahan pemukiman akibat tanah mereka digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan peruntukan lainnya bisa mengubah struktur dan tradisi masyarakat hingga menghilangkan situs-situs sakral dan budaya yang mempunyai nilai spiritualitas bagi mereka.³

Masifnya perampasan dan alih fungsi lahan ini juga telah menghilangkan pengetahuan perempuan dalam berbagai aspek kehidupan. Salah satunya adalah dalam budidaya pertanian. Perempuan mempunyai pengetahuan dalam pemuliaan (memilih dan memelihara) benih. Namun saat ini pengetahuan tersebut dipinggirkan dan semakin hilang karena petani telah menggunakan benih-benih hibrida produksi perusahaan dengan skala besar. Benih-benih lokal sudah semakin kehilangan tempatnya di hati masyarakat petani. Propaganda benih dari produsen benih yang bergandengan tangan dengan pemerintah untuk memprovokasi petani agar menggunakan bibit hibrida semakin kuat, baik secara langsung di kelompok-kelompok tani maupun melalui media sosial, bahwa penggunaan benih hibrida lebih menguntungkan petani karena produksinya yang tinggi dan umur panen yang singkat. Begitu juga dengan promosi penggunaan pupuk-pupuk kimia dan racun-racun pembunuh hama telah menyingkirkan pengetahuan

³<https://wri-indonesia.org/id/blog/bagi-masyarakat-adat-kehilangan-lahan-sama-saja-kehilangan-nyawa>

dan pengalaman masyarakat yang secara turun temurun mereka praktikkan dalam pengelolaan pertanian. Bertani tidak lagi dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat, tetapi untuk produksi massal demi keuntungan korporasi.

Namun, jika dikaji lebih jauh pemakaian bibit hibrida dan sarana pertanian berbahan kimia produksi pabrik tidak memberikan keuntungan yang nyata bagi petani, tapi justru memberikan kerugian dan membuat petani tidak mandiri karena setiap mulai awal musim tanam dan merawat tanaman, mereka harus mengeluarkan biaya yang cukup besar untuk membeli berbagai kebutuhan untuk sarana produksi pertanian. Setiap kali musim tanam, bibit harus dibeli karena bibit hibrida tidak bisa dijadikan bibit untuk musim tanam berikutnya. Hal lainnya adalah bahwa bibit hibrida tidak akan berproduksi dengan baik ketika input pertanian (pupuk dan pengendalian hama) yang diberikan tidak setara dan sesuai dengan kebutuhan tanaman untuk mendukung pertumbuhannya. Berbeda halnya dengan menggunakan benih lokal yang tentu saja telah beradaptasi dengan kondisi alam dan lingkungan tumbuhnya selama ini.

Melalui sistem pertanian konvensional dengan kearifan lokal yang dimiliki semua masyarakat di belahan bumi telah mampu memenuhi dan mensejahterakan kehidupan petani karena sarana produksi pertanian bisa dihasilkan dan dibuat dari bahan-bahan yang ada di sekitar lahan pertanian mereka, yang tentu saja juga mampu menjaga kelestarian dan keberlanjutan ekosistem. Namun propaganda yang dilakukan oleh produsen benih dan pupuk telah menggeser dan mengikis kearifan lokal yang dimiliki oleh masyarakat seiring berjalannya waktu. Dalam kunjungannya ke Kediri tahun 20014, *Vandana Shiva* mengatakan bahwa cara berkebun atau bertani yang benar adalah berdasarkan hukum alam,

bukan berdasarkan hukum pabrik kimia yang membuat pupuk kimia di dunia. Ketika kita bekerja sesuai dengan hukum alam maka semuanya dapat terdaur ulang dengan baik dan kita juga bisa lebih memproduksi dengan lebih baik.

Modernisasi dan kapitalisme tidak hanya merampas tanah dan sumber daya alam masyarakat di banyak tempat, bukan hanya di Indonesia tapi juga di belahan bumi lainnya, tapi lebih dari itu telah menghilangkan nilai-nilai kekeluargaan, guyub, gotong royong, dan toleransi. Masyarakat dijadikan sebagai makhluk individu yang tidak lagi punya sensitivitas terhadap alam dan lingkungan dan menjadi semakin konsumtif. Cara pandang masyarakat menjadi instan mengikuti, tanpa berpikir keberlanjutan dan kelestarian alam. Propaganda kapitalis yang dilegitimasi oleh negara telah menguasai kehidupan masyarakat dalam segala ranah kehidupan. Kapitalisme merupakan suatu paham yang hegemonik, sehingga tidak hanya mengintervensi dalam bentuk produk, tetapi sampai pada cara pandang dan keyakinan masyarakat.

Indonesia sebagai Negara agraris yang terletak di jalur khatulistiwa yang subur tak lagi mampu mensejahterakan kehidupan masyarakatnya. Kesejahteraan hanya dimiliki segelintir orang yang punya modal dan kekuasaan. Masyarakat terlebih perempuan akan selamanya mengalami penindasan dan ketidakadilan jika tidak mau melakukan perlawanan atas situasi yang memiskinkan ini. Kapitalisme juga telah mematahkan pengetahuan perempuan sebagai pengelola dan penjaga peran produktifnya karena telah digantikan oleh mesin-mesin dengan tujuan untuk meningkatkan produksi demi kepentingan pasar.



BAGIAN III

MEREKA YANG TELAH MEMULAI PERLAWANAN

***Membangun Kekuatan Kolektif, Memberdayakan Diri
dan Memperkuat Ekonomi Sebagai Strategi Perlawanan***





Pembangunan yang berorientasi pada kepentingan investasi dan politik ekonomi global telah merampas dan menghancurkan kedaulatan perempuan Indonesia, baik kedaulatan atas hidup maupun kedaulatan atas sumber kehidupannya. Eskalasi penindasan dan perampasan atas kehidupan perempuan di berbagai konteks terus menguat dan dilanggengkan oleh negara melalui berbagai kebijakan dan program/proyek yang tidak terlepas dari intervensi kepentingan aktor global. Di beberapa wilayah di mana komunitas Solidaritas Perempuan bekerja dan berjuang bersama perempuan akar rumput, perempuan telah merasakan dampak dari deretan panjang kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah atas nama percepatan pembangunan maupun peningkatan ekonomi.

Berangkat dari persoalan itu, SP merasa penting untuk membangun dan mengembangkan gerakan kolektif kemandirian ekonomi bagi perempuan akar rumput maupun bagi organisasi. Kemandirian ekonomi merupakan strategi yang penting tidak hanya dalam memberikan dan memulihkan sumber-sumber kehidupan perempuan, tetapi juga menjadi ruang konsolidasi kekuatan kolektif perempuan untuk tetap mempertahankan kedaulatan yang mereka miliki. Karenanya, kemandirian ekonomi ini perlu disertai dengan penguatan nilai dan prinsip agar dapat mencapai tujuan tersebut. Konsep kemandirian ekonomi juga dibangun untuk menjaga kesinambungan organisasi dengan mengemukakan karakter organisasi SP sebagai organisasi Feminis.

Konsep yang diperkenalkan oleh SP adalah Feminis Ekonomi Solidaritas (FES). FES ini merupakan wadah yang tepat untuk

memperkuat gerakan kolektif perempuan, baik untuk kemandirian ekonomi maupun untuk melanjutkan dan menjaga perjuangan mereka atas penindasan dan ketidakadilan yang dialami. Kemandirian ekonomi yang dibangun berbasis kearifan lokal, pengalaman, dan pengetahuan perempuan serta potensi lokal yang bermuara pada penguatan perempuan marjinal dalam memenuhi kebutuhannya secara berkelanjutan yang dilandasi rasa solidaritas dan kerja sama tanpa monopoli pasar.

Konsep kemandirian ekonomi yang dibangun Solidaritas Perempuan, harus tumbuh secara natural sesuai potensi dan kearifan lokal yang ada di sekeliling perempuan. Penguatan ekonomi ini tidak mengutamakan orientasi keuntungan, melainkan kekuatan sosial sebagai modal utama dan perempuan sebagai penggerakannya. Ekonomi solidaritas ini juga sebagai strategi SP untuk terus mendorong kemandirian ekonomi perempuan yang berkeadilan gender dan mampu mensejahterakan perempuan secara berkelanjutan.

Gerakan kolektif kemandirian ekonomi perempuan dan organisasi merupakan salah satu tujuan yang ingin dicapai oleh organisasi. Hal ini juga sebagai upaya untuk menjaga keberlanjutan perjuangan dan perlawanan di berbagai wilayah, di mana saat ini banyak perempuan mengalami penindasan dan ketidakadilan yang diciptakan oleh negara maupun swasta. Gerakan kolektif ini juga untuk menjaga semangat juang dan keberlanjutan organisasi. Mulai tahun 2018, di beberapa komunitas SP praktik-praktik gerakan kemandirian ekonomi secara kolektif telah mulai muncul dan berkembang dengan baik, baik di kelompok perempuan maupun di komunitas SP seperti di komunitas SP Mamut Menteng Kalimantan Tengah, SP Palembang, SP Sebay Lampung, SP Kinasih Jogja, SP Palu dan SP Sintuwu Raya Poso. Sementara komunitas SP yang lain

juga sudah mulai mendiskusikan potensi yang bisa dikembangkan maupun bentuk yang akan dipraktekkan nantinya.

Satu tahun terakhir ini, Seknas bersama komunitas SP telah mendokumentasikan praktik baik gerakan kolektif kemandirian ekonomi feminis ini sebagai sebuah pembelajaran baik perjalanan organisasi yang senantiasa hadir dan berjuang bersama perempuan untuk melawan penindasan dan ketidakadilan dalam berbagai ruang kehidupan. Cita-cita besar yang ingin dicapai oleh SP melalui gerakan kolektif ini adalah terwujudnya tatanan kehidupan yang demokratis, adil dan setara bagi perempuan dalam berbagi akses dan kontrol dalam pengelolaan sumber daya. Semoga praktik-praktik baik yang sudah dilakukan ini bisa menginspirasi banyak perempuan di mana saja berada, juga sebagai sumber pengetahuan dan pembelajaran bagi komunitas SP lainnya maupun bagi perempuan yang saat ini juga sedang berjuang melawan tirani yang meminggirkan dan menyengsarakan kehidupan mereka.

Cerita dari Bumi Tambun Bungai Kalimantan Tengah

Menyemai Harapan Memperkuat Perlawanan “Potret Bawik Dayak Membangun Kemandirian Ekonomi sebagai Upaya



Merebut dan Mempertahankan Kedaulatannya“

Sebagai Provinsi kedua terluas di Indonesia, Kalimantan Tengah memiliki luas 15,3 juta hektar, dengan kawasan hutan seluas 10,7 hektar. Sebagian besar hutan yang ada di Kalimantan Tengah telah beralih fungsi dan dikuasai korporasi. Seluas 12,8 juta hektar atau 78% hutan telah dikonversi untuk perkebunan sawit, pertambangan dan usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu juga dikonversi untuk hutan tanaman industri. Terbukanya ruang investasi ini telah memperlebar ketimpangan kepemilikan dan penguasaan lahan bagi masyarakat.

Tak jarang pengambilalihan penguasaan lahan oleh swasta telah menimbulkan konflik horizontal di tengah masyarakat. Eskalasi konflik terus meningkat dari tahun ke tahun. Tidak adanya mekanisme penyelesaian konflik yang fundamental dan ketegasan hukum khususnya bagi perusahaan yang secara nyata telah melanggar dan merebut hak – hak masyarakat. Dalam situasi konflik, masyarakat akan terdampak, terutama kelompok rentan seperti perempuan, lansia, disabilitas dan anak-anak. Konflik ini tentu saja melahirkan

deretan penderitaan panjang bagi mereka karena harus kehilangan sumber-sumber kehidupan dan penghidupannya. Hutan dan tanah tidak lagi bisa diakses dan dimanfaatkan oleh masyarakat marjinal termasuk perempuan.

Tidak hanya perampasan tanah, perusahaan juga telah merampas hak perempuan atas lingkungan yang sehat. Sungai dan lingkungan hidup mereka telah tercemar oleh limbah pabrik dan bahan-bahan kimia yang digunakan oleh perusahaan, baik untuk perkebunan maupun untuk pertambangan. Masyarakat tidak bisa lagi mendapatkan air yang sehat untuk dikonsumsi. Tentu saja kondisi ini bisa berdampak terhadap kesehatan. Lagi-lagi, perempuan adalah kelompok rentan yang terdampak akibat kondisi ini. Penyakit bisa menghampiri mereka setiap saat, yang paling berisiko adalah penyakit yang berhubungan dengan organ reproduksi.

Semakin terbatasnya lahan dan terbatasnya akses mereka masuk hutan, telah menyebabkan himpitan beban hidup yang berat bagi mereka. Untuk mendapatkan kebutuhan pangan harian saja mereka sangat kesulitan. Lahan pertanian yang mereka olah tak lagi bisa menjanjikan masa depan. Hama-hama dari perkebunan sawit dengan garang melahap dan meluluhlantakkan tanaman yang mereka tanam. Tak jarang hasil panen hanya bisa mencukupi kebutuhan pangan keluarga dalam hitungan minggu. Kondisi ini berbeda jauh ketika hutan mereka belum diabrak abrik oleh perusahaan. Padi lokal yang mereka tanam dan panen mampu mencukupi kebutuhan mereka tahun ke tahun menjelang musim panen tiba.

Mereka tak pernah kekurangan lauk pauk dan sayuran karena hutan dan sungai bisa memberikan mereka berkah yang melimpah. Tapi sekarang kondisi tak sama lagi, mereka masyarakat Dayak hanya bisa mengais rezeki di lahan-lahan yang mereka reklamasi dari penguasaan perusahaan. Kebutuhan pangan dasar seperti sayur-

sayuran menjadi barang mewah yang sulit mereka dapatkan saat ini.

Situasi itu semakin menimbulkan kegelisahan masyarakat khususnya perempuan karena mereka semakin kesulitan menjalankan putaran roda rumah tangga. Mulailah mereka melakukan diskusi-diskusi kecil sekedar membincang dan membicarakan persoalan mereka. Hingga pada akhir tahun 2012 Solidaritas Perempuan datang ke Mantangai. Bersama perempuan di desa Mantangai, Kalumpang dan Sei Ahas mempelajari bersama situasi dan kondisi yang dialami oleh perempuan. Mengalirlah cerita dari mereka, bahwa banyak proyek yang masuk ke desa mereka namun mereka tak pernah dilibatkan pada pengambilan keputusan penting terkait pelaksanaan kegiatan itu, padahal mestinya setiap keputusan diambil berkaitan dengan lahan dan hutan, pada kenyataannya, peran perempuan di wilayah tersebut dalam pengelolaan sumber daya alam sangat lah kuat.

Dalam masyarakat Dayak, hutan yang menghidupi mereka laksana perempuan yang dalam kesehariannya sangat dekat dan melekat dengan hutan. Hutan berperan besar dalam kehidupan,¹ namun ironisnya dalam setiap pengambilan keputusan berkaitan dengan pengelolaan hutan sangat jarang perempuan dilibatkan. Kepentingan negara dan pembangunan patriarki telah menyingkirkan perempuan dari ruang-ruang strategisnya terhadap akses dan kontrol terhadap sumber daya alam yang ada.

Aktivitas mereka sehari-harinya adalah menyadap karet, menangkap ikan, mencari kayu dan obat-obatan di dalam hutan di sekitar tempat tinggal mereka. Ketergantungan mereka atas sumber daya hutan masih sangatlah tinggi. Apapun yang terjadi pada hutan di sekitar wilayah hidup mereka akan berdampak pada kehidupan

¹Wawancara dengan mantir adat desa Kalumpang pak Sj, 16 Oktober 2022

mereka, baik secara langsung maupun tidak langsung. Bagi orang Dayak, hutan adalah segalanya, sebagai eksistensi nilai spiritualitas di samping nilai ekonomi, sehingga tak kan pernah merelakan hutan mereka diobrak abrik dihancurkan dan dirampas dengan paksa segala isinya karena hutan adalah masa depan mereka.

Melalui diskusi-diskusi yang dilakukan oleh kelompok perempuan bersama SP Mamut Menteng, terbangunlah kesadaran perempuan bahwa mereka harus bangkit, bersatu dan berjuang untuk merebut kembali kedaulatannya. Meski kadang semangat melawan mesti tertahan karena ketiadaan biaya untuk mendukung usaha yang mereka lakukan, namun ketika lelah sudah mulai reda, mereka membangun kekuatan lagi, termasuk memikirkan cara agar dapat terus berlawanan. Hingga terbangunlah gerakan kolektif untuk membangunkeberdayaanekonomiyangbisa mendukung perjuangan dan kebutuhan hidup mereka. Mereka memanfaatkan potensi dan pengetahuan yang dimiliki untuk membangun dan mengembangkan gerakan kemandirian ekonomi, seperti membangun kebun kolektif, maupun keterampilan mengolah sumber daya yang ada. Tentu saja keberlanjutan lingkungan menjadi hal penting yang harus mereka jaga.

Kelompok Perempuan Desa Mantangai Hulu

Desa Mantangai Hulu merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah. Lahan dan hutan di Mantangai Hulu merupakan lahan gambut yang sangat rawan mengalami kebakaran. Apalagi saat ini eksploitasi besar-besaran oleh swasta telah mengubah tipologi lahan-lahan gambut tersebut. Mantangai Hulu juga menjadi lokasi proyek Pembukaan Lahan Gambut (PLG) 1 juta hektar di era

1990-an. Pembukaan kanal-kanal telah mengeringkan banyak lahan dan menghilangkan fungsi spons dari gambut, hal ini telah menyebabkan mudahnya terjadi kebakaran hutan. Pada tahun 2015 silam terjadi kebakaran hutan yang cukup parah di desa Mantangai Hulu yang berdampak pada kesehatan masyarakat, terutama yang berhubungan dengan saluran pernafasan.

Wilayah desa terhampar di pinggiran sungai Kapuas dan dipotong melintang dari barat ke timur oleh Sungai Mantangai. Desa Mantangai Hulu merupakan wilayah dataran rendah (rawa dan sungai) dengan sumber penghidupan masyarakat berasal dari sumber daya air dan hutan. Mata pencaharian pokok masyarakat di Desa Mantangai Hulu adalah bertani padi gunung, mencari ikan dan memanfaatkan hasil hutan. Selain hasil hutan kayu terdapat pula komoditas yang dihasilkan dari tanaman perkebunan seperti karet dan sengo.

Sungai yang jernih dan hutan yang lebat merupakan sumber kehidupan mereka. Aneka ragam kebutuhan mereka terpenuhi oleh sungai dan hutan. Sayangnya saat ini sungai Kapuas telah berubah keruh dan tercemar bahan kimia dari perkebunan sawit, tambang emas dan batubara. Selaian menghilangkan sumber kehidupan masyarakat, kehilangan hutan juga telah menimbulkan konflik antar masyarakat desa karena perbedaan pandangan dan kepentingan.

Sebagian warga berpandangan bahwa kehadiran perkebunan sawit sebagai peluang untuk menciptakan lapangan kerja baru. Sebagian yang lainnya berpendapat bahwa bagi masyarakat Dayak, alam yang lestari merupakan ajaran leluhur yang harus dipelihara, karena ini merupakan gambaran kehidupan masyarakat Dayak yang hidup berdampingan dengan alam dan saling menjaga agar kehidupan bisa dijalankan dengan seimbang. Menurut salah seorang mantir adat yang sempat kami wawancara, keseimbangan

merupakan kunci kehidupan orang Dayak. Keseimbangan dalam hidup melahirkan kasih sayang, baik sesama manusia maupun dengan lingkungan juga dengan sang pencipta.² Di mana manusia yang menjaga kelestarian alam, maka alam akan menjaga dan mencukupi kehidupannya dan sebaliknya, ketika alam sudah dirusak dan keseimbangan sudah tidak terjaga maka alam juga akan bergejolak dengan caranya.



Kebun kolektif kelompok perempuan Mantangai Hulu

dalam diskusi-diskusi dengan anggota Solidaritas Perempuan menginisiasi lahirnya kelompok perempuan desa Kalumpang yang bisa menjadi ruang belajar juga sebagai ruang berbagi pengetahuan dan pengalaman bagi perempuan.

Mereka aktif melakukan diskusi-diskusi untuk membincang situasi dan persoalan yang dihadapi oleh perempuan sebagai dampak hilangnya akses dan kontrol perempuan terhadap hutan. Mereka juga mengajak perempuan yang lain untuk terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan. Hingga saat ini mereka telah memiliki anggota sebanyak 37 orang.

Melalui kelompok mereka menebar benih kebersamaan dan Solidaritas dan memupuk semangat dan keinginan untuk merebut dan mempertahankan lahan mereka dari penguasaan swasta, salah

²Wawancara dengan mantir adat desa Kalumpang, pak Sj, 16 Oktober 2022

satunya PT Usaha Handalan Perkasa (UHP) yang mengelola ribuan hektar perkebunan sawit di tanah masyarakat. Selain diskusi-diskusi kelompok mereka juga membuat kebun yang dikelola secara kelompok. *Bawi Dayak* atau perempuan Dayak memiliki prinsip bahwa “*menanam adalah melawan.*” Menanam adalah cara perempuan untuk melawan dan mempertahankan tanahnya. Karena tanah dan hutanlah yang selama ini menjadi sumber kehidupan mereka, termasuk juga sungai yang berada di dalam hutan tersebut. Tanah, hutan dan sungai telah menjadi penyangga kehidupan masyarakat Dayak. Dari tanah, hutan dan sungai, kebutuhan pangan mereka terpenuhi.

Kelompok ini membuat kebun bersama di lahan seluas 0,5 Ha di Sei Hambie milik salah seorang anggota kelompok. Lahan yang dijadikan kebun kelompok ini merupakan lahan yang berhasil mereka reklamasi dari penguasaan perusahaan. Kebun itu mereka tanami dengan aneka tanaman pangan seperti kacang panjang, kangkung, terong, cabe, jahe, serai, kunyit, timun, lengkuas dan oyong (gambas) untuk memenuhi kebutuhan pangan.



Pembukaan Lahan untuk Menanam Padi

Untuk memulai berkebun, mereka “patungan” untuk membeli bibit dan biaya transportasi ke kebun karena mereka harus menggunakan “*Ces*” perahu motor untuk bisa sampai ke kebun mereka yang terletak di pinggir sungai Hambie yang

berseberangan dengan perkampungan mereka. Anggota kelompok juga tidak semuanya memiliki *Ces*, oleh sebab itu mereka harus

mengatur waktu ke kebun sehingga bisa bersamaan perginya dengan anggota yang memiliki Ces. Pengelolaan kebun dilakukan secara bergotong royong. Mereka bergiliran ke kebun untuk merawat dan menjaga kebun dari serangan hama. Di tahun pertama, tanaman mereka tumbuh dengan baik dan subur, sehingga hasil panennya pun menggembirakan. Selain digunakan untuk memenuhi kebutuhan pangan, kelompok juga menjual sebagian hasil panen yang mereka peroleh. Hasil penjualan mereka simpan sebagai kas atau dana kelompok yang bisa digunakan untuk membiayai kebun dan kegiatan kelompok lainnya.

Tahun-tahun pertama berkebun mereka mendapatkan hasil yang cukup baik, tapi karena kebun mereka terletak persis di pinggir sungai, berkali-kali kebun mereka dihantam banjir dan merusak tanaman yang ada. Hanya tanaman rimpang seperti jahe, lengkuas dan serai yang mampu bertahan. Melihat kondisi ini akhirnya anggota kelompok bersepakat untuk memindahkan kebun kelompok ke lahan lain yang jauh dari sungai dan dekat dari perkampungan sehingga lebih aman dari banjir, juga aman bagi mereka yang mengunjungi kebun secara sendiri-sendiri, baik dari ancaman binatang buas maupun orang yang berniat jahat.

Pada November 2019, mereka mulai membuka kebun di lahan yang baru. Kali ini mereka ingin menanam padi. Beberapa jenis padi lokal mereka persiapkan untuk ditanam. Walaupun ada larangan membakar di lahan oleh pemerintah, tapi para perempuan hebat ini tetap teguh dengan pendirian untuk membuka lahan dengan cara membakar. Membakar lahan untuk persiapan areal tanam merupakan kearifan lokal warisan leluhur mereka sebagai orang Dayak. Sisa tebasan atau gulma di lahan yang sudah kering ketika dibakar diyakini meningkatkan kesuburan tanah, begitu juga dengan tanah yang sudah dibakar, akan menjadi

lebih subur karena abu sisa pembakaran menjadikan tanah semakin gembur sehingga ideal untuk menunjang pertumbuhan tanaman.

Mereka tidak khawatir akan terjadi kebakaran lahan yang lebih luas dan membahayakan karena mereka punya cara untuk membatasi penyebaran apinya. Pengetahuan masyarakat Dayak yang diwariskan secara turun temurun mengajarkan bahwa sebelum membakar mereka harus memperhatikan tanda-tanda alam seperti melihat bintang/rasi bintang, arah angin dan membuat parit-parit di sekeliling lahan mereka. Selain itu membakar harus dilakukan pada pagi atau sore, tidak pada saat siang yang panas, sehingga arah api bisa dikendalikan.

Namun karena seringnya terjadi kebakaran hutan gambut di Kalimantan, pemerintah membuat peraturan daerah tidak boleh membakar di lahan karena akan membahayakan dan dapat menyebabkan terjadinya kebakaran lahan yang lebih luas. Justru perusahaanlah yang menyebabkan terjadinya kebakaran hutan secara besar-besaran hingga berdampak pada kesehatan masyarakat, namun pemerintah malah menganggap masyarakat sebagai biang keladinya, mestinya perusahaanlah yang dituntut dan diberi sanksi. Di sinilah drama ketidakadilan itu dipertontonkan secara nyata oleh pemerintah. Atas nama kepentingan dan pembangunan ekonomi, pemerintah memberikan pembenaran atas kesalahan yang dilakukan oleh perusahaan dan mengkambinghitamkan masyarakat yang dianggap berbuat kesalahan.

Keberanian kelompok perempuan untuk mempertahankan tradisi leluhur ini juga menginspirasi masyarakat lainnya untuk mengolah lahan mereka yang selama ini terlantar akibat adanya larangan membakar di lahan. Karena sejak adanya larangan membakar dari pemerintah, banyak lahan masyarakat yang dibiarkan terlantar dan tidak diolah. Hal ini juga berpotensi untuk dikuasai oleh pihak lain

karena dianggap lahan terlantar dan tidak ada pemiliknya. Seluas 1 Ha lahan mereka tanami berbagai jenis padi lokal dengan cara manual yaitu dengan membuat lubang-lubang kecil berjejer rapi di atas lahan yang diisi dengan sejumlah benih padi.

Beberapa jenis padi lokal yang mereka kembangkan adalah Geragai, Indu Sangumang, Siyam, Boras merah, Bariwit, Kawung, Hamuntai Baputi, Manyahi, Jambu Bahandang, Tampurihat, Luwau Kantor, Hamuntai Babenda dan Nampui. Cita rasa beras yang dihasilkan oleh bulir padi ini sangat enak dan wangi. Dulunya tangan-tangan terampil para perempuanlah yang dengan telaten memilah dan memilih benih untuk disimpan sebagai benih dan untuk pangan keluarga. Namun saat ini dengan banyak padi-padi hibrida yang diperkenalkan, menyebabkan benih warisan mereka mulai tersingkir. Hal inilah yang memotivasi untuk mengembangkan kembali benih warisan leluhur mereka sebagai upaya mengembalikan kedaulatan mereka atas benih dan pangan.

Tutor Perempuan tentang Perjuangan Membangun Kemandirian



Padi Garagai



Padi Siyam



Padi Bariwit



Padi Indu Sangumang



Padi Merah



Padi Kawung



Hamuntai Baputi



Hamuntai Bahenda



Manyahi



Jambu Bahandang



Tampurihat



Nampui



Luwu Kantof

Varietas Padi yang dikembangkan Kelompok Perempuan
Matangai Hulu



Kearifan Lokal dengan Sistem Bakar di Lahan

Sayangnya perubahan iklim yang ekstrim telah berdampak pada pertanian mereka. Pertengahan tahun 2019 kelompok perempuan desa Mantangai menanam berbagai jenis padi lokal di kebun kolektif mereka. Sebanyak 120 kg benih mereka tanam. berapa jenis Hasil panen mereka tak membahagiakan. Pada saat panen di awal tahun 2020 mereka hanya bisa mendapatkan 23 kg gabah saja. Perubahan iklim telah memporak porandakan harapan mereka. Musim hujan yang tak bisa ditebak menyebabkan lahan mereka digenangi banjir dan merusak bulir-bulir padi. Selain itu hama juga semakin banyak seperti hama burung, tikus, belalang dan serangga lainnya yang juga menyerang tanaman padi mereka.

Kerusakan ekosistem yang parah karena alih fungsi lahan menyebabkan rusaknya habitat berbagai hewan, hingga kebun dan ladang masyarakatlah yang dijadikan sarang atau rumah baru mereka. Kegagalan panen ini sangat memukul dan melemahkan semangat yang berujung pada kekecewaan. Mereka berharap panen yang terjadi pada bulan April 2020 di tengah pandemi covid-19 bisa membantu mereka untuk menghadapi masa-masa sulit, namun hasilnya sangat jauh dari harapan. Untuk benih pada musim tanam berikutnya saja tidak cukup, apalagi untuk bisa membantu mencukupi kebutuhan pangan mereka.

Selain berkebun, kelompok perempuan desa Mantangai juga mengembangkan keterampilan anyaman rotan dan purun karena dua tumbuhan ini cukup banyak tumbuh dan ditemukan di hutan dan sekitar hunian mereka. Namun sayangnya masifnya

pembukaan lahan untuk perkebunan sawit dan tambang, bahkan proyek *food estate* yang mengincar lahan-lahan produktif mereka, sehingga tumbuhan tersebut juga terancam punah. Berbagai bentuk kerajinan tangan mereka hasilkan seperti tikar, tas, bakul, keranjang dan aksesoris seperti gelang dan anting-anting. Motif-motif khas Dayak seperti Mata Andau, Saluang Anak Asang, motif sungai dan lainnya, dimana motif-motif ini menceritakan dan menggambarkan kehidupan masyarakat Dayak.

Menganyam bagi perempuan bukan hanya sekedar menghasilkan barang, tapi juga sebagai ruang perlawanan untuk mempertahankan hutan. Ketika mereka masih bisa menganyam mengindikasikan bahwa rotan dan purun masih ada di sekitar mereka. Walaupun melalui pembukaan lahan yang besar-besaran ini bukan hanya rotan dan purun yang terancam punah tapi juga flora dan fauna yang ada di dalamnya. Karena rotan tumbuh di hutan dan purun sebagai rumput liar yang tumbuh di pinggir-pinggir sungai sebagai tanaman konservasi, maka mereka harus menjaga hutan dan lingkungan mereka agar rotan dan purun tetap ada, termasuk melawan berbagai proyek yang akan berdampak pada kepunahannya. Dengan begitu, perempuan masih bisa menganyam untuk kebutuhan rumah tangga maupun untuk dijual, sekaligus melestarikan pengetahuan dan keterampilan yang mereka miliki.

Produk kelompok perempuan ini dijual di desa Mantangai, desa tetangga, dan toko-toko souvenir di Palangka Raya. Saat ini, ada permintaan dari luar negeri (London, Inggris) untuk produk purun mereka. Selain itu SP Mamut Menteng menjembatani pemasaran produk-produk perempuan melalui media sosial dan jejaring yang dimiliki.

Kelompok perempuan ini juga mulai merangkul anak-anak muda di desa Mantangai. Mengajak, memperkenalkan dan

mengajarkan mereka untuk menganyam rotan. Menganyam rotan merupakan pengetahuan leluhur mereka sebagai orang Dayak yang mulai tergantikan oleh barang-barang pabrikasi baik itu peralatan rumah tangga maupun berbagai macam aksesoris yang biasa digunakan oleh masyarakat, oleh sebab itu masyarakat Dayak harus mengembalikan kekayaan pengetahuan leluhur ini. beberapa anak muda mulai tertarik untuk belajar dan membuat kerajinan rotan. Produk yang mereka hasilnya sesuai dengan cita rasa anak muda seperti membuat anting dan gelang.

Setelah 3 tahun berjalan, anggota sudah merasakan manfaatnya. Mereka juga mulai mengembangkan kegiatan produktif membuat anyaman rotan, karena rotan juga banyak tumbuh di Mantangai. Berbagai produk mereka buat seperti tikar, tas, bakul, keranjang, anting, cincin dan gelang. Namun pemasaran produk masih menjadi tantangan bagi mereka. SP Mamut Menteng berusaha menjembatani pemasaran produk mereka melalui toko-toko *handicraft* yang ada di Palangka Raya maupun melalui sekretaritas nasional, juga melalui perserikatan.

Tak mudah memang menjaga keharmonisan dan kekompakan dalam kelompok, selalu ada riak-riak kecil yang mewarnai. Tantangan pengurus menjalankan kelompok adalah seperti adanya kecemburuan dan ketidakpercayaan dari anggota, juga rasa minder karena masih merasa kurang pengalaman dan pengetahuan. Namun SP dan sahabat SP lainnya selalu memotivasi dan menguatkan sehingga pengurus tetap kuat dan bersemangat menjalankan roda organisasi. Harapannya kelompok yang sudah dibangun ini bisa menjadi ruang belajar dan ruang aman bagi perempuan di Mantangai juga sebagai alat perjuangan untuk melawan segala bentuk penindasan dan ketidakadilan yang dialami perempuan.

Dalam sebuah pertemuan kelompok, perempuan di Mantangai

Hulu mengatakan bahwa mereka masih perlu menata kelompok ini menjadi lebih baik dengan membuat aturan yang jelas dan bisa dijalankan oleh semua anggota. Di samping aturan, penting juga dibangun nilai-nilai yang akan menjadi roh organisasi dan perekat bagi semua anggota. Naik turunnya semangat anggota dalam berkelompok terjadi karena di antara mereka masih ada rasa ketidakpercayaan dan kecemburuan. Aturan dan nilai-nilai bisa menjadi titik pijak untuk menjalankan organisasi atau kelompok dengan transparan dan adil bagi semua anggota.

Kelompok perempuan desa Mantangai terus berbenah diri sehingga bisa menjadi motor penggerak untuk gerakan perempuan di sana, bukan hanya berdaya secara ekonomi namun perempuan harus menjadi bagian dalam setiap gerak pembangunan di desa. Oleh sebab itu mereka terus menerus memperkuat gerakan kolektif dan manajemen kelompok seperti membuat aturan-aturan organisasi yang akan menjadi panduan bagi anggota dalam menjalankannya. Mereka semakin menyadari bahwa berkollektif bisa menjadi ruang bagi mereka untuk menempa diri dan memperjuangkan perbaikan hidup. Selain itu, kegiatan kelompok bisa menjadi alat perjuangan mempertahankan tanah dari perampasan oleh aktor-aktor kapitalis. Di atas tanah itu mereka bisa membangun kemandirian ekonomi, mengembalikan kearifan lokal dan pengetahuan perempuan yang terpinggirkan.

Kelompok Perempuan Desa Kalumpang

Kalumpang adalah salah satu desa yang terletak di Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah. Letak desa ini memanjang menyusuri sungai Kapuas. Mayoritas masyarakat bermata pencaharian sebagai petani, nelayan sungai, berkebun dan peramu hasil hutan. Saat ini perjalanan ke desa Kalumpang sudah bisa ditempuh melalui jalur darat dari Palangka

Raya, namun kendaraan masih sangat terbatas dengan biaya yang cukup mahal. Namun perkembangan ini cukup membantu masyarakat yang akan ke Kalumpang atau sebaliknya

Proyek pembukaan Lahan Gambut 1 juta hektar pada tahun 1996 juga ada di desa Kalumpang. Proyek ini telah membuka jalan bagi masuknya perusahaan-perusahaan perkebunan sawit ke desa ini. Banyak masyarakat yang terdampak akibat masuknya investasi ini. Mereka kehilangan lahan dan hutan karena penguasaan swasta. Selain itu akses mereka ke hutan juga dibatasi, dan sungai yang selama ini menghidupi mereka juga tercemar bahan-bahan kimia yang digunakan oleh perkebunan maupun tambang-tambang.

Sistem pertanian konvensional yang menghargai kearifan lokal dan dipraktikkan oleh masyarakat secara turun temurun mulai berganti dengan pertanian modern yang menggunakan pupuk-pupuk dan racun kimia buatan pabrik. Ditambah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, Nomor 1 tahun 2020 yang diundangkan pada 4 Agustus 2020 tentang Pengendalian Kebakaran Lahan telah membatasi masyarakat untuk mengelola dan mengolah lahan pertanian mereka. Walaupun Perda ini memberi peluang untuk membakar lahan, namun harus dengan aturan-aturan tertentu seperti melapor pada pejabat berwenang, sehingga dalam praktiknya peraturan itu tetap menyulitkan masyarakat karena pengurusan izinnya tidaklah mudah.

Di sisi lain, alih fungsi lahan juga semakin masif terjadi di Kalumpang. Hutan sebagai sumber penghidupan dan kehidupan masyarakat telah berganti dengan tanaman sawit. Saat ini ada 3 perusahaan sawit yang beroperasi di desa Kalumpang yaitu Perusahaan Kalimantan Lestari Mandiri (KLM), Usaha Handalan Perkasa (UHP) dan Rezki Alam Semesta Raya (RASR). Ketiga perusahaan ini menimbulkan konflik horizontal di tengah

masyarakat karena perbedaan kepentingan, baik oleh yang pro atau yang kontra pada perusahaan.

Hilangnya hutan karena alih fungsi lahan telah menimbulkan banyak kesulitan hidup bagi masyarakat desa Kalumpang khususnya perempuan. Di antaranya terjadinya perubahan iklim yang bisa mengubah kehidupan masyarakat. Perubahan iklim telah mempengaruhi kalender cocok tanam mereka, musim hujan atau musim kemarau tak bisa diperkirakan lagi. Mereka tak bisa lagi berpedoman pada rasi bintang karena angkasa tak selalu menghadirkan bintang sebagai petunjuk bagi mereka yang pesannya disampaikan oleh kicauan burung-burung. Namun sekarang, tanda-tanda alam itu sudah tidak bisa mereka pedomani lagi.

Hal yang tersisa dari semua eksploitasi dan ekstraktif ini hanyalah rantai penderitaan bagi masyarakat. Mereka tak bisa lagi menggantungkan hidup pada kemurahan alam karena ekosistem yang sudah terganggu. Hama-hama semakin banyak menyerang tanaman pertanian mereka, karena tempat tinggal mereka di tengah hutan sudah dihancurkan sehingga tikus, babi, ular dan hama lainnya mencari hunian dan lumbung makanan yang baru. Hutan-hutan tempat burung membangun sarang dan berkicau telah ditebangi sehingga mereka harus bertengger di atas malai-malai padi milik masyarakat sembari memakan sari-sarinya sehingga yang tersisa hanyalah gabah kosong dan hampa.

Saat ini untuk memenuhi kebutuhan pangan, mereka harus membeli, sementara tempat berusaha semakin terbatas. Tak salah ujaran terlontar dari mulut mereka bahwa, *“kebijakan pemerintah ataupun program pemerintah yang berbungkus mensejahterakan masyarakat, justru sebaliknya malah menyengsarakan masyarakat. Investasi dan masuknya perusahaan sawit hanya memberikan*

keuntungan bagi segelintir orang saja, sedangkan yang lainnya hanya bisa menjadi penonton di pinggiran”³



Diskusi Harung Hapakat

Berangkat dari situasi itu, beberapa orang perempuan desa Kalumpang membentuk kelompok perempuan sebagai ruang berdiskusi dan berbagi pengetahuan untuk perempuan. Tahun 2016, berawal dari 10 orang lahir lah kelompok

“*Hurung Hapakat*” yang artinya gotong royong. Kelompok ini secara rutin mengadakan diskusi-diskusi untuk membincang situasi dan persoalan yang dihadapi oleh perempuan di desa mereka. Pada waktu-waktu tertentu kegiatan diskusi ini juga dihadiri oleh teman-teman aktivis perempuan dari Palangkaraya juga anggota SP dari Sekretariat Nasional Jakarta. Saat ini kelompok semakin berkembang dengan jumlah anggota sekitar 40 orang.

Di tahun 2017, kelompok Hurung Hapakat mulai membangun kebun kolektif di lahan salah satu anggota. Mereka menanam berbagai sayuran di lahan tersebut. Hasil panen dimanfaatkan untuk membantu pangan keluarga mereka. Kelompok Hurung Hapakat mendapatkan dukungan yang cukup baik



Anggota Kelompok Membersihkan Kebun Kolektif

³Bincang-bincang dengan perempuan Kalumpang dan Mantangai, tanggal 18 Oktober 2022

dari pemerintah dengan dipinjamkan lahan desa untuk dijadikan kebun kolektif. Di lahan tersebut, mereka menanaminya dengan berbagai macam tanaman sayuran yang sehari-hari mereka butuhkan. Saat itu tujuan utama mereka berkebun adalah untuk pemenuhan kebutuhan pangan keluarga, karena sejak hutan mereka dikonversi menjadi perkebunan skala besar, masyarakat terutama perempuan menjadi kesulitan untuk mendapatkan kebutuhan pangan karena akses mereka terhadap hutan sangat dibatasi.

Untuk kebutuhan sayur-sayuran masyarakat desa Kalumpang sangat tergantung pada pasokan dari luar. Makanya saat pandemi Covid-19 harga-harga kebutuhan pangan menjadi mahal dan meningkat berkali-kali lipat. Karena diterapkannya aturan pembatasan perjalanan dan aktivitas masyarakat sehingga pasar mereka menjadi sepi dan tidak ada pedagang yang berjualan. Kebun kolektif ini sangat dirasakan manfaatnya oleh perempuan yang tergabung dalam kelompok. Jika ada kelebihan hasil panen, mereka akan menjualnya dan uangnya disimpan sebagai dana kelompok yang bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan operasional kelompok.



Mengolah Rotan untuk dijadikan anyaman

Saat di kebun, sembari menyiangi lahan, panen dan pekerjaan lainnya mereka melakukan diskusi-diskusi untuk meningkatkan pengetahuan mereka. Mereka membincang situasi dan persoalan-persoalan

yang dihadapi oleh perempuan. Sekali waktu kawan-kawan dari SP Mamut Menteng datang menyambangi dan terlibat dalam diskusi dan perbincangan yang mereka lakukan, atau sekedar berbagi pengetahuan dan pengalaman.

Semakin hari, kegiatan kelompok Hurung Hapakat makin berkembang. Selain berkebun, mereka juga memiliki kelompok menganyam rotan. Produk anyaman rotan sudah mulai mendapatkan pasaran yang cukup baik. SP Mamut Menteng membantu mempromosikan dan memasarkan anyaman rotan yang mereka buat melalui media sosial juga menghubungkan dengan pembeli yang ada di Palangka Raya. Keuntungan dari penjualan anyaman rotan ini selain dinikmati oleh pengrajin juga disisihkan untuk dana kelompok.

Kelompok terus berbenah diri dan memperbaiki tata kelolanya. Aturan dan nilai-nilai dalam kelompok mereka sepakati bersama. Semua anggota mempunyai posisi yang setara dan terlibat dalam setiap pengambilan keputusan dalam kelompok. Awal tahun 2022, kelompok perempuan Harung Hapakat desa Kalumpang terus melakukan kegiatan-kegiatan untuk memperkuat kapasitas pengurus dan anggota, juga untuk meningkatkan keterampilan mereka untuk mengembangkan produk-produk kelompok.

Kegiatan yang dilakukan oleh Kelompok perempuan Hurung Hapakat juga mendapatkan dukung yang sangat baik dari pemerintah desa. Pemerintah desa Kalumpang mempunyai rencana untuk memberikan dukungan peralatan untuk kelompok perempuan agar memudahkan pekerjaan mereka mengolah rotan mentah menjadi siap anyam.⁴ Kepala Desa Kalumpang juga berjanji untuk menjembatani pemasaran produk anyaman rotan yang dihasilkan oleh kelompok perempuan. Perjalanan mengelola dan membesarkan kelompok bukanlah perjalanan yang mudah dan mulus. Menjalankan dan mengembangkan kelompok tentulah suatu hal yang tak mudah bagi mereka dengan segala keterbatasan. Banyak tantangan dan sandungan yang mereka hadapi. Kecemburuan, ketidakpercayaan

⁴Wawancara dengan kepala desa Kalumpang tanggal 16 Oktober 2022

pada pengurus, kurang percaya diri, kurang pengalaman dan pengetahuan merupakan tantangan yang ada di kelompok. Mereka saling mengingatkan dan saling menguatkan bahwa mereka punya cita-cita bersama yang ingin dicapai yaitu untuk memperjuangkan kehidupan dan masa depan perempuan yang lebih baik. Semangat kegotongroyongan menjadi salah satu nilai yang mendasari kelompok. Selain itu, nilai solidaritas menjadi perekat dalam setiap kerja yang mereka lakukan.

Wong Perempuan Bumi Sriwijaya Yang Gagah Berani

Asa di tengah Konflik - Perjuangan Kelompok Perempuan di Seri Bandung



Aksi masyarakat Desa Seri Bandung menuntut tanah mereka dikembalikan oleh PTP VII Cinta Manis

Desa Seri Bandung dengan luas lebih kurang 188,25 Ha merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan. Secara geografis desa ini termasuk daerah dataran rendah, 6 meter di atas permukaan laut dan merupakan daerah dengan lahan pertanian dan perkebunan yang cukup luas, di mana 78 hektar wilayahnya terdiri dari lahan pertanian dan perkebunan.

Sebagai desa yang cukup subur dengan lahan pertanian dan perkebunan yang luas, masyarakat desa Seri Bandung hidup dengan sejahtera dan berkecukupan. Kebun-kebun karet masyarakat menghampar di sepanjang jalan desanya juga kebun nanas dan ladang-ladang masyarakat. Namun kesejahteraan ini berubah pahit setelah masuknya PTPN VII Cinta Manis pada tahun 1982. PTPN VII Cinta Manis mengokupasi lahan-lahan masyarakat untuk ditanami tebu. Masyarakat kehilangan lahan untuk bertani dan usaha lainnya karena lahan sudah dikuasai oleh PTPN VII Cinta Manis.

Masyarakat kehilangan lahan-lahan produktif mereka sebagai sumber kehidupannya, terutama perempuan. Kesulitan hidup terpampang di depan mata. Mata pencaharian masyarakat jadi berubah. Awalnya sebagai petani kemudian beralih menjadi buruh harian di kebun tebu terpaksa mereka lakukan untuk mencari penghidupan. Penghasilan sebagai buruh harian lepas tidak mampu mencukupi kebutuhan keluarga mereka karena upah yang rendah. Di antara mereka, ada juga yang terpaksa menjadi pekerja rumah tangga dan nelayan bahkan membuka warung kecil sekedar untuk mendapatkan sedikit uang guna memenuhi kebutuhan hidup. Terkadang walaupun suami dan isteri keduanya bekerja namun masih belum bisa memenuhi dan mencukupi kebutuhan keluarga mereka, karena rata-rata hanya bekerja sebagai buruh lepas. Buruh harian lepas di PTPN VII Cinta Manis juga sering mengalami keterlambatan pembayaran gaji dan bahkan tidak ada jaminan kesehatan buat mereka.

Semenjak hadirnya PTPN VII Cinta Manis inilah berbagai persoalan mulai muncul dan dirasakan oleh masyarakat Seri Bandung khususnya perempuan. Mulai dari kesulitan pemenuhan kebutuhan hidup keluarga hingga konflik-konflik dengan PTPN

VII Cinta Manis yang tak berkesudahan hingga sekarang yang melahirkan trauma bagi masyarakat masyarakat yang berjuang belum mendapatkan hak-haknya, terutama perempuan dan anak. Dampak situasi ini adalah beban perempuan makin bertambah. Walaupun laki-laki juga mengalami hal yang sama namun perempuan akan menanggung tanggung jawab yang lebih besar dibandingkan laki-laki karena semua hampir semua urusan domestik dikerjakan oleh perempuan. Sementara dalam pengambilan keputusan strategis dalam keluarga dan di kampung suara perempuan nyaris tak didengarkan .



Kelompok Perempuan Pejuang Desa Seri Bandung

penguatan pada masyarakat terutama perempuan melalui diskusi-diskusi yang bertujuan untuk memberikan penyadaran-penyadaran terkait hak-hak perempuan juga hak atas tanah. Kegiatan ini disambut baik oleh perempuan dan telah melahirkan kesadaran

Tahun 2012 terjadi perseteruan yang luar biasa antara masyarakat dengan PTPN VII Cinta Manis. Konflik ini menimbulkan korban di masyarakat. Ada ada anak umur 12 tahun yang meninggal karena peluru nyasar dan 13 orang warga ditahan tanpa ada kejelasan. Saat itu SP Palembang hadir bersama Komnas HAM dan memberikan penguatan pada masyarakat yang menjadi korban. Sejak saat itu SP Palembang hadir di Seri Bandung dan memberikan

untuk memperjuangkan hak-haknya. Pada tanggal 1 September 2014 berdirilah Kelompok Perempuan Pejuang Seri Bandung (KPPS) sebagai alat perjuangan juga sebagai ruang meningkatkan solidaritas sesama perempuan pejuang.

Kelompok ini diinisiasi oleh 8 orang perempuan desa Seri Bandung yaitu Sugiarti, Zubaidah, Patmawati, Mursiah, Emilia, Tanzia, Tibyani dan Nuraini. KPPS terbuka bagi perempuan desa Seri Bandung yang punya kepedulian dengan perjuangan yang dilakukan oleh masyarakat. Kelompok ini sebagai wadah bagi perempuan desa Seri Bandung untuk memperjuangkan hak mereka atas tanah dan membangun kemandirian ekonomi dalam rangka memperpanjang nafas dan semangat perjuangan.



KPPS memulai Kemandirian Ekonomi dengan membuat kebun kolektif di pinggir kebun tebu milik PTPN VII Cinta Manis. Perempuan ingin memperlihatkan bahwa okupasi yang dilakukan oleh PTPN VII Cinta Manis telah menyingkirkan dan meminggirkan masyarakat dari tanah leluhurnya. Kebun kolektif perempuan ini seringkali digusur dan dirusak oleh oknum perusahaan. Selain itu kebun mereka juga sering dihantam banjir akibat limpahan air sungai yang dibendung oleh perusahaan karena posisi lahan yang berada di rawa dataran rendah. Lahan yang tidak strategis belum memberikan perbaikan terhadap perekonomian mereka. Mereka beralih dengan membuat kendang (alat rumah tangga), namun ini

usaha ini juga tidak memberikan hasil yang baik karena bahan baku yang harus dibeli dengan harga yang cukup besar, akhirnya usaha ini tak dilanjutkan. Mereka juga belajar membuat pupuk organik dari sampah dapur yang difasilitasi oleh Solidaritas Perempuan Palembang. Sekali lagi usaha ini belum memperlihatkan hasil dan manfaat maksimal bagi kelompok

Kebun kolektif dan membuat kendang tidak memiliki prospek yang bagus untuk dilanjutkan, akhirnya mereka memutuskan untuk tidak melanjutkannya. Mereka mencoba kegiatan baru dengan memanfaatkan lahan pekarangan untuk menanam bawang di polybag. Bawangnya tumbuh dengan subur dan menghasilkan, tapi lagi-lagi mereka diperhadapkan dengan tingginya biaya produksi karena mereka harus membeli bibit dengan biaya yang cukup besar. Selain itu, ternak yang lepas liar juga sering memakan tanaman mereka. Akhirnya kegiatan ini pun terhenti.



Anggota KPPS menanam bawang di polibag
memanfaatkan pekarangan



Anggota KPPS membuat Kemplang Ubi

sapi. Didukung oleh Universitas Muhammadiyah Palembang

Namun, bukan pejuang namanya kalau anggota KPPS cepat menyerah. Mereka mencoba lagi kegiatan baru yaitu membuat Biogas karena di Seri Bandung cukup banyak masyarakat yang punya

(UMP) mereka mencoba membuat Biogas, tapi hasil bio gasnya juga tidak bagus karena kualitas kotoran ternak yang tidak terlalu baik karena ternak sapi dilepas liarkan oleh pemilik sehingga urine dan kotoran sapinya tidak tercampur. Usaha biogas ini pun dianggap kurang maksimal untuk dikembangkan.

Di tahun 2018 KPPS mencoba lagi usaha yang baru yakni membuat kerupuk singkong. Ada beberapa anggota yang menanam singkong dengan memanfaatkan rawa-rawa yang tidak ditanami tebu oleh PTPN VII Cinta Manis. Dari sekian banyak usaha yang dicoba, membuat keripik singkong ini lah yang memberikan secercah harapan dan prospek yang baik hingga berlanjut sampai sekarang.



Perwakilan KPPPS mendatangi kantor BUMN untuk menyampaikan tuntutan

membantu sebesar Rp 10.000.000,-. Dana ini digunakan untuk membeli alat-alat produksi seperti baskom, wajan dan peralatan lainnya, juga untuk tambahan modal. Selain itu, KPPS juga mendapatkan bantuan peralatan dari Universitas Muhammadiyah Palembang (UMP) berupa mesin parut dan alat *press* singkong. UMP juga memberikan pelatihan-pelatihan untuk anggota KPPS.

Kegiatan-kegiatan dalam KPPS tidak melulu membuat keripik singkong tapi mereka juga meningkatkan pengetahuan dan

Semakin hari usaha ini semakin berkembang. Kegigihan KPPS juga mendatangkan dukungan dari pihak lainnya, seperti pemerintah desa dan Universitas. Tahun 2018 KPPS mendapatkan bantuan dari pemerintah desa Seri Bandung untuk

kesadaran akan hak-haknya sebagai perempuan maupun sebagai warga negara. Diskusi-diskusi ini telah memperkuat kesadaran kritis dan merawat semangat anggota KPPS untuk terus memperjuangkan tanah leluhur mereka yang telah 4 dasawarsa dikuasai oleh PTPN VII Cinta Manis.

Berbagai ruang dan forum mereka gunakan untuk menyuarakan situasi yang mereka alami, bukan hanya di Palembang tapi juga nasional seperti Kementerian BUMN dan Kementerian ATR/BPN di Jakarta, meskipun perjuangan mereka masih belum mendapatkan hasil. Tanah mereka masih dikuasai oleh PTPN VII Cinta Manis. Sementara masyarakat harus menjadi buruh dan kuli di lahan leluhur mereka. Kalaupun mereka berkebun, itu hanya di pinggiran rawa yang tidak ditanami oleh PTPN dengan tebu.

KPPS juga membangun dan menyepakati nilai sebagai roh dan landasan perjuangan mereka. Solidaritas, empati, tenggang rasa, transparan, anti kekerasan, menghargai keberagaman, tidak monopoli dan menghargai lingkungan merupakan manifestasi nilai-nilai feminis yang juga menjadi nilai utama dalam KPPS. Nilai-nilai ini harus dipahami dan dipraktikkan oleh anggota KPPS dalam kehidupan sehari-hari. Agar gesekan-gesekan maupun perselisihan bisa diantisipasi dalam kelompok maka setiap anggota berkewajiban untuk saling mengingatkan satu dengan yang lainnya. Selain itu, juga aturan-aturan yang harus diikuti dan ditaati oleh setiap anggota. Misalnya saja, anggota harus hadir dalam pertemuan rutin yang waktunya disepakati bersama, jika tidak bisa hadir harus menginformasikan pada kelompok. Pergantian pengurus akan dilakukan setiap 2 tahun, dan yang paling penting bahwa setiap anggota harus mempunyai komitmen untuk membangun dan menghidupkan kelompok.

Pandemi Covid-19 juga berdampak pada usaha yang dilakukan

oleh KPPS. Penjualan mereka menurun karena permintaan pasar juga menurun. Namun KPPS masih bisa memproduksi sekurangnya 100 kg kerupuk setiap bulannya untuk dipasarkan dalam desa dan desa tetangga yang sudah mengenal produk mereka. Namun setelah situasi mulai membaik, maka permintaan pasar juga kembali normal bahkan melebihi kapasitas produksi mereka. Saat ini keripik singkong yang dibuat oleh KPPS dibandrol dengan harga Rp 30.000,- perkilonya.

Keuntungan yang mereka dapatkan dari hasil penjualan kerupuk ini hanya 50% yang dibagikan pada anggota. Sisanya digunakan untuk menambah modal usaha dan dana perjuangan. Keuntungan akan mereka bagi setiap tahun. Sejak 2 tahun terakhir 15 orang anggota KPPS yang terlibat langsung dalam produksi kerupuk singkong ini sudah menikmati hasilnya. Sejak November 2019 KPPS sudah mendapatkan izin PIRT dari Badan POM Palembang dengan merk produk "*Emping Ubi Emak*." Izin PIRT ini dibutuhkan sebagai jaminan mutu untuk memperkuat nilai jual produk mereka. Emping Ubi Emak, selain dipasarkan langsung di pasar-pasar desa, juga dipasarkan melalui media sosial anggota juga media sosial yang dimiliki oleh SP Palembang. KPPS sendiri saat ini sedang mengupayakan adanya rumah produksi tempat mengolah dan menyimpan aset kelompok karena selama ini alat-alat produksi maupun rumah produksi masih menumpang di rumah salah satu anggota kelompok.

Sejak berdirinya tahun 2014, banyak manfaat yang dirasakan oleh anggota KPPS. Mereka bisa meningkatkan pengetahuan dan pengalaman. Melalui KPPS sudah banyak lahir perempuan-perempuan pemimpin di desa Seri Bandung yang sudah berani bersuara di forum-forum, bukan hanya di desanya tapi juga di Palembang bahkan dalam *event-event* nasional. Saat ini KPPS

juga sudah dikenal oleh banyak anak muda di Palembang sebagai kelompok perempuan yang memperjuangkan hak atas tanah dari desa Seri Bandung. Kelompok Perempuan Pejuang Seri Bandung sejak berdirinya hingga sekarang memang berkomitmen penuh untuk terus berjuang melawan ketidakadilan dan penindasan bagi perempuan. Segala daya upaya akan terus mereka perjuangkan untuk merebut hak-hak mereka yang sejak 1982 telah dirampas oleh PTPN VII Cinta Manis.

Tujuan usaha kemandirian ekonomi yang mereka bangun adalah sebagai alat perjuangan untuk merebut tanah mereka dari penguasaan PTPN VII Cinta Manis, bukan hanya bertujuan untuk mendapatkan uang. Dari keuntungan yang mereka dapatkan melalui penjualan keripik singkong sebagian dialokasikan untuk mendukung kerja-kerja perjuangan mereka. Namun demikian cita-cita mulia tentu saja menemukan tantangan karena di mata masyarakat, kerja-kerja yang mereka lakukan di kelompok bukanlah pekerjaan yang lazim dilakukan oleh perempuan. Budaya masyarakat mengharuskan perempuan di rumah. Perempuan juga sebagai makmum laki-laki sehingga tak semestinya perempuan yang memegang kendali terhadap perlawanan dan perjuangan. Begitulah pandangan patriarki yang juga mengakar di desa mereka.

Perempuan yang sering keluar rumah atau keluar malam akan mendapatkan stigma sebagai perempuan nakal atau perempuan yang kurang baik, terlebih jika perempuan itu tidak memiliki suami atau perempuan bercerai. Tantangan lainnya yang dihadapi oleh KPPS adalah bahwa perempuan dianggap tidak mumpuni dalam memimpin karena tidak memiliki pendidikan dan pengetahuan yang cukup untuk jadi pemimpin dan bisa memimpin. Namun demikian tantangan ini tak pernah melemahkan semangat anggota KPPS. Mereka saling menguatkan satu sama lain, saling mempercayai

dan saling mendukung dalam menjaga semangat perjuangan yang mereka lakukan. Perempuan hebat di KPPS ini juga terus menerus memberikan pengertian dan pemahaman pada anggota keluarga untuk mendapatkan dukungan atas kerja-kerja yang mereka lakukan. Mereka menjadikan keluarga sebagai barisan pendukung utama dalam perjuangan mereka.

Ekonomi Solidaritas SP Palembang

Kemandirian ekonomi yang digagas oleh Solidaritas Perempuan Palembang sejak tahun 2019 juga mulai memperlihatkan hasil yang baik. Walaupun keinginan untuk memiliki koperasi anggota belum terwujud, namun usaha-usaha untuk menyokong pendanaan organisasi sudah mulai dilakukan. Untuk sementara mereka menamakannya “*Usaha Solidaritas SP Palembang*” yang mulai dijalankan sejak Juni 2022.

SP Palembang memulai usaha ini dengan modal kepercayaan dan kebersamaan. Tidak ada modal khusus yang mereka alokasikan untuk usaha ini. Mereka memulai dengan menjual baju yang ditawarkan pada anggota dan sahabat-sahabat SP Palembang. Keuntungan dari penjualan baju ini mereka gunakan untuk membeli Emping Ubi Emak yang dibuat oleh KPPS untuk kemudian dipasarkan langsung di Palembang juga melalui media sosial mereka. Selain menjual Emping Ubi Emak, saat ini Ekonomi Solidaritas SP Palembang juga memasarkan makanan khas Palembang seperti Mpek-mpek dan kerupuk buatan anggota.

Dalam pengelolaannya, Ekonomi Solidaritas SP Palembang mempunyai manajemen sendiri yang berkoordinasi langsung dengan Bendahara Komunitas. Ada satu orang staf dan 3 orang *volunteer* yang fokus mengelola Usaha Ekonomi Solidaritas ini. Mereka membangun komunikasi dengan produsen dan pembeli

maupun mempromosikan produk-produk yang mereka miliki, serta secara berkala menginformasikan pada pengurus BEK melalui bendahara mengenai perkembangan Usaha Ekonomi Solidaritas.

Cerita dari *Sai Bumi Ruwa Jurai* Lampung

Sai Bumi Ruwa Jurai, itulah semboyan masyarakat Lampung yang juga sebagai identitas asli leluhur masyarakat Lampung yang berarti *Satu Bumi Dua Jiwa*. Sesuai dengan semboyannya Sai Bumi Ruwa Jurai, masyarakat di Lampung dikelompokkan dalam dua suku yaitu suku Lampung Pesisir dan suku Lampung Pepadun. Meskipun sama-sama menjadi masyarakat asli, namun kedua suku ini memiliki perbedaan yang cukup mencolok, baik dalam bahasa maupun tata cara dan adat istiadat lainnya.

Suku Lampung Pesisir sesuai dengan lamanya tinggal di sepanjang pesisir Lampung. Diyakini, masyarakat, suku Pesisir ini menjadi cikal bakal suku Lampung di Indonesia. Hal ini ditandai dengan hadirnya Kerajaan Sekala Berak yang merupakan kerajaan tertua di Lampung, berada di dataran Belalau, sebelah selatan Danau Ranau yang secara administratif berada di Kabupaten Lampung Barat.

Sampai saat ini, Kerajaan Sekala Berak masih berdiri dengan memiliki empat Kepaksian (sub-kerajaan) yang tersebar di seluruh Lampung yakni Paksi Buay Bejalan Diway yang didirikan oleh Umpu Bejalan Diway di Sukarami Liwa, Paksi Buay Belunguh yang didirikan oleh Umpu Belunguh di Barnasi Belalau, Paksi Buay Nyerupa yang didirikan oleh Umpu Nyerupa di dan Paksi Buay Pernong yang didirikan oleh Umpu Pernong di Batu Brak.⁵

⁵http://p2k.unimus.ac.id/id1/3058-2937/Kepaksian-Sekala-Brak_41700_kepaksian-sekala-brak-un-imus.html

Masyarakat suku Pesisir cenderung lebih selektif dan hanya masyarakat yang memiliki garis keturunan raja atau bangsawan yang berhak untuk mendapatkan gelar adat dan menjadi Raja. Mahkota (Siger) yang digunakan oleh perempuan suku Pesisir memiliki 7 lekuk yang menandakan 7 sungai yang ada di Lampung dengan hiasan bunga pada bagian atas. Hal ini menggambarkan bahwa sungai sebagai sumber kehidupan sangat dekat dengan kehidupan perempuan suku Pesisir Lampung.

Sementara suku Pepadun Lampung tinggal di daerah tengah atau daratan terkonsentrasi di wilayah pedalaman dan dataran tinggi. Sistem kekerabatan yang digunakan oleh masyarakat Suku Pepadun adalah sistem patrilineal di mana garis kekerabatan bertumpu pada garis keturunan laki-laki. Berbeda halnya dengan suku Pesisir, masyarakat biasa suku Pepadun bisa mendapatkan gelar bangsawan dengan meminta gelar adat melalui upacara Begawi.⁶ Sedangkan Siger yang digunakan oleh perempuan suku Pepadun berjumlah 9 lekuk yang melambangkan 9 marga yang membentuk Abung Siwo Megou.⁷ Masyarakat “Abung Siwo Megou” berasal dari 9 (sembilan) keturunan atau Jurai Siwo yang terdiri dari Anak Tuha, Nuban, Nunyai, Unyi, Subing, Kunang, Selagai, Nyerupa dan Beliuk. Masing-masing Jurai Siwo ini mendiami sejumlah tempat di Kabupaten Lampung Tengah.

Di Sai Bumi Ruwa Jurai inilah pada tahun 1998 dibentuk kelompok kerja kerja Solidaritas Perempuan untuk menyikapi persoalan-persoalan ketidakadilan yang dialami oleh masyarakat dan perempuan akibat pembangunan-pembangunan yang dilakukan

⁶Dikenal juga dengan istilah Begawi Cakak Pepadun, yaitu upacara adat untuk memberikan gelar adat pada seseorang di Suku Pepadun

⁷Abung Siwo Migo Adalah Kelompok Masyarakat Adat Terbesar di Lampung. Abung Adalah

Sebuah Nama Kelompok Masyarakat, Sedangkan Siwo Berarti Sembilan dan Migo artinya Marga. Dikatakan besar karena Memiliki Masyarakat, Wilayah, Yang Besar Pula

negara dengan tidak memperhatikan keberlangsungan hidup masyarakat marjinal. Kelompok kerja ini akhirnya dikukuhkan menjadi sebuah komunitas SP pada tahun 2000 yang diberi nama komunitas SP Sebay Lampung untuk menjadi wadah perjuangan bagi masyarakat yang mengalami penindasan dan ketidakadilan. SP Sebay Lampung sempat dibekukan di awal pendiriannya, namun diaktifkan kembali pada Kongres VI SP di Yogyakarta.

SP Sebay Lampung terus memperluas gerakannya untuk menjangkau lebih banyak perempuan di Bumi Ruwai Juwa, untuk memperkuat kesadaran kritis, membangun dan memperkuat gerakan kolektif memperjuangkan keadilan dan kesetaraan bagi perempuan. Di antara kelompok perempuan yang diperkuat oleh SP Sebay Lampung, ada di desa Sidodadi kabupaten Pesawaran dan Teluk Bone Cungkeng Kota Karang

Kebun Kolektif untuk Kedaulatan Pangan Perempuan Desa Sidodadi Lampung

Kelompok perempuan desa Sidodadi yang berdiri sejak tahun 2018 diinisiasi oleh beberapa orang perempuan yang sehari-harinya bekerja sebagai petani. Di kelompok, mereka berdiskusi tentang berbagai persoalan yang dihadapi oleh perempuan, mulai dari harga sarana pertanian yang mahal, tidak meratanya bantuan sosial di desa juga rendahnya keterlibatan perempuan dalam ruang-ruang pengambilan keputusan di desa.

Kelompok ini mulai mengembangkan kembali benih-benih lokal yang ada di desa, dan membuat sendiri pupuk organik yang akan digunakan dalam bertani. Awalnya kegiatan ini tidak mendapat tanggapan yang cukup baik dari masyarakat bahkan cenderung meremehkan. Namun lama-kelamaan masyarakat mulai tertarik untuk ikut dalam kegiatan kelompok. Sejak tahun 2020 kelompok

mulai mengembangkan kebun kolektif menanam tanaman pangan untuk memenuhi kebutuhan pangan keluarga dengan memanfaatkan lahan milik salah satu warga. Di samping kebun kolektif, kelompok juga membuat keripik pisang yang saat ini sudah mulai dipasarkan di warung-warung desa juga dalam kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh SP Sebay Lampung.

Selain aktif melakukan diskusi di kelompok dan mengelola kebun kolektif, kelompok perempuan Sidodadi juga mengembangkan kegiatan pemanfaatan lahan pekarangan untuk meningkatkan ketersediaan pangan dan menambah ekonomi keluarga dengan menanam berbagai sayuran. Kelompok perempuan Sidodadi juga menginisiasi pasar desa untuk perempuan. Hasil panen anggota ditampung di kelompok sebelum dipasarkan melalui pasar desa. Kelompok perempuan ini juga aktif melakukan aksi-aksi sosial, seperti menggalang donasi bagi masyarakat khususnya perempuan yang sedang mengalami musibah.

Di kelompok ini juga telah terbentuk koperasi simpan pinjam. Modal dari koperasi ini adalah keuntungan penjualan kebun kolektif, keripik pisang dan iuran anggota. Koperasi ini beranggotakan 25 orang, namun penerima manfaat bukan hanya anggota saja tapi juga perempuan lain yang membutuhkan modal untuk bertani atau mengembangkan usaha lainnya. Sistem pembayaran atau cicilan disepakati bersama sesuai dengan kemampuan peminjam.

Praktik baik dari kelompok perempuan ini mendapatkan tanggapan dan respon baik oleh pemerintah desa Sidodadi. Kepala desa Sidodadi menyampaikan agar kegiatan serupa bisa dikembangkan di semua dusun yang ada di Sidodadi. Untuk memperlihatkan dukungannya, tanggal 30 November 2021, pemerintah desa mengundang kurang lebih 60 orang perempuan

untuk hadir dalam pertemuan desa. Dalam pertemuan ini kepala desa menyampaikan apresiasi dan dukungannya atas kerja-kerja yang telah dilakukan oleh kelompok perempuan, bahkan dia menandatangani surat dukungan yang menyatakan bahwa desa akan mengalokasikan pendanaan untuk mendukung kegiatan di kelompok. Selain itu pemerintah desa juga akan mencarikan lahan yang bisa dipakai untuk kebun kolektif.

Gerakan Kolektif untuk Melawan Pengusuran

Teluk Bone Cungkeng masuk dalam kelurahan Kota Karang Kecamatan Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung. Di sana terdapat perkampungan nelayan yang dianggap sebagai kawasan kumuh oleh pemerintah maupun masyarakat. Teluk Bone Cungkeng atau sering dikenal dengan Cungkeng dihuni oleh sekitar 30 kepala keluarga. Mereka tidak memiliki bukti kepemilikan yang sah atas tanah yang mereka tempati, sehingga mereka tidak pernah membayar pajak setiap tahunnya. Walaupun sudah dilarang membuat rumah di daerah ini, namun karena tidak ada pilihan lain mereka terpaksa mendirikan bangunan di atas laut layaknya rumah apung walaupun mereka tahu kerentanan dan risiko yang akan dihadapi.

Kebanyakan perempuan di Cungkeng bekerja sebagai buruh harian lepas penyortiran ikan kering di pulau Pasaran, juga sebagai pekerja rumah tangga. Sebagai buruh harian lepas, tidak ada kepastian pekerjaan dan upah. Mereka bergantung pada hasil tangkapan dan kemurahan hati pemilik kapal. Rata-rata mereka mendapatkan upah sebesar Rp 35.000 – 40.000 perhari dengan bonus makan siang dari majikan. Mereka akan bekerja dari jam 09.00 – 14.00 WIB, namun adakalanya mereka gagal bekerja dan pulang dengan tangan kosong karena tidak ada hasil tangkapan. Sementara itu, perempuan juga bekerja sebagai PRT paruh waktu dengan jam kerja dari 06.00 – 08.30, setelahnya mereka bisa bekerja

di penyortiran ikan.

Sejak tahun 2017, wacana menjadikan Cungkeng sebagai kawasan wisata sudah santer terdengar oleh masyarakat yang menimbulkan kegelisahan-kegelisahan di tengah mereka. Pemerintah Kota Karang bekerja sama dengan Bank Dunia melalui program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) berencana menggusur masyarakat Cungkeng dan menata wilayahnya untuk dijadikan kawasan wisata. Walikota pernah menjanjikan bahwa tidak akan ada penggusuran masyarakat di Cungkeng. Walikota juga menghimbau agar masyarakat menata dan merapikan perkampungan mereka. Saat itu jembatan yang merupakan alat penghubung masyarakat dari dan ke Cungkeng dalam kondisi yang sangat memprihatinkan. Jembatan tersebut terbuat dari pohon kelapa dan papan yang sudah bolong di sana-sini sehingga sangat rawan untuk dilewati apalagi saat malam dengan penerangan yang redup.

Ketika SP Sebay Lampung datang, perempuan di Cungkeng mulai mendapatkan pencerahan dan pengetahuan. Mereka mulai menyadari akan hak-hak sebagai manusia dan sebagai perempuan, di mana salah satunya adalah hak untuk mendapatkan perumahan yang layak. Mereka juga mulai memahami hak sebagai perempuan nelayan, karena sebelumnya yang dipahami sebagai nelayan adalah hanya mereka yang mencari ikan ke laut, dan itu adalah laki-laki. Mereka belum menyadari bahwa sebagai orang yang bekerja di sektor perikanan adalah juga nelayan. SP Sebay Lampung telah memberikan kekuatan bagi mereka untuk berjuang.

Perempuan di Cungkeng mulai mengorganisir diri untuk memperkuat gerakan kolektif sebagai sebuah perjuangan. Awalnya kegiatan mereka diremehkan oleh beberapa warga, bahkan mereka juga sempat diintimidasi oleh pemerintah karena dianggap

melawan program pemerintah. Intimidasi ini sempat melemahkan dan menyurutkan langkah mereka. Beberapa saat kegiatan mereka terhenti. Tapi SP Sebay Lampung terus menguatkan dan memotivasi mereka untuk terus berjuang mempertahankan tempat tinggal mereka.

Gerakan kolektif mereka juga semakin menguat yang dimotori oleh kelompok perempuan di sana. Mereka mengumpulkan dukungan masyarakat untuk membangun jembatan mereka yang rusak. Ada iuran warga setiap minggunya yang dikumpulkan oleh kelompok. Selain itu, juga ada sumbangan sukarela dari beberapa orang setelah melaut dan menjual hasil tangkapan mereka. Atas kerja keras kelompok perempuan dalam merajut kebersamaan dan membangun solidaritas, mereka berhasil membangun jembatan permanen di kampung mereka dengan swadaya sepanjang 100 meter. Jembatan ini memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat Cungkeng dengan mempermudah transportasi dari dan menuju ke Cungkeng, juga mempermudah nelayan pergi melaut.

Teluk Bone Cungkeng juga menjadi lebih tertata dan indah. Untuk merawat jembatan yang telah dibangun, mereka membuat kotak *amal* semacam kotak sumbangan warga yang ditempatkan di salah satu rumah warga. Setiap warga yang pulang melaut akan menyisihkan sedikit penghasilannya di kotak amal, begitu juga masyarakat lain yang ingin berdonasi. Sebagai masyarakat pesisir, mereka juga berusaha mengembangkan potensi ekonomi yang ada seperti pengolahan hasil laut untuk dijadikan ikan kering dan makanan, meskipun pemasaran masih menjadi tantangan bagi mereka, namun mereka masih terus mencoba.

Hingga saat ini, mereka masih bisa bertahan tanpa digusur. Pelaksanaan program KOTAKU tidak menyasar perkampungan

warga. Proyek KOTAKU hanya membuat taman kota di mulut gang menuju perkampungan masyarakat Cungkeng. Selain itu, komunikasi antara kelompok perempuan dengan pemerintah mulai terjalin. Beberapa anggota kelompok perempuan mulai terlibat dalam kegiatan-kegiatan pelatihan yang diadakan oleh pemerintah. Perempuan di Cungkeng berkeinginan membuat tepung ikan karena bahan bakunya banyak di sekitar mereka. Untuk itu mereka berkomunikasi dan melobi Dinas Perikanan agar diberikan pelatihan atau keterampilan membuat tepung ikan.

Bagi perempuan di Cungkeng, gerakan kolektif yang sudah dibangun merupakan strategi bertahan dari rencana penggusuran oleh program KOTAKU. Melalui diskusi-diskusi kelompok yang dilakukan bersama SP Sebay Lampung makin menumbuhkan kesadaran kritis dalam diri mereka untuk berjuang dan mempertahankan ruang hidup. Dari gerakan kolektif yang mereka bangun, saat ini telah memperlihatkan hasil baik, yaitu mereka masih bisa bertahan di Cungkeng walaupun sebelumnya ada rencana penggusuran perkampungan mereka. Hasil nyata lainnya adalah terbangunnya jembatan penghubung yang dibangun secara swadaya oleh masyarakat.

Kabar Perempuan Petani dari Yogyakarta

Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) adalah salah satu daerah otonom setingkat Provinsi yang beribukota di Yogyakarta. Provinsi dengan luas wilayah 3.133,15 kilometer persegi berada di tengah Pulau Jawa menghadap ke Samudera Hindia. Yogyakarta pernah menjadi ibukota negara Republik Indonesia sejak tanggal 4 Januari hingga 17 Desember 1949. Provinsi yang memiliki semboyan memayu hayuning bawana (mempercantik keindahan dunia) memiliki 4 Kabupaten dan 1 Kota, yaitu Kabupaten Kulon Progo

di bagian barat, Kabupaten Bantul di bagian selatan, Kabupaten Gunungkidul di bagian barat, Kabupaten Sleman di bagian utara, dan Kota Yogyakarta di bagian tengah.

Di Yogyakarta inilah SP Kinasih didirikan 24 tahun silam yang diinisiasi oleh aktivis-aktivis SP dengan tujuan untuk memperluas gerakan feminis. SP Kinasih telah mewarnai gerakan perempuan dan lingkungan di Yogyakarta dengan perspektif feminisnya. Juga melakukan penguatan dan bekerja dengan perempuan akar rumput di beberapa wilayah di Jogja, di antaranya di kabupaten Kulon Progo tepatnya di Kecamatan Kalibawang dan Samigaluh juga di daerah pinggiran Ledhok Timoho.

Kelompok Tani Perempuan Kharisma Kulon Progo Jogja

Kulon Progo yang berada di sebelah barat Sungai Progo (kata kulon dalam Bahasa Jawa artinya barat) secara geografis berbatasan dengan Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul di timur, Samudra Hindia di selatan, Kabupaten Purworejo di barat, serta Kabupaten Magelang di utara. Bagian barat laut wilayahnya merupakan pegunungan (Bukit Menoreh), sedangkan di bagian selatan merupakan dataran rendah yang landai hingga ke pantai.

Kelompok Tani Perempuan Kharisma tumbuh dari kesadaran perempuan petani di desa Kalibawang Kulonprogo untuk mempertahankan dan menyebarluaskan sistem pertanian lestari sebagai pengetahuan, kearifan lokal dan budaya. Melalui diskusi yang dilakukan bersama Solidaritas Perempuan Kinasih, Yogyakarta sejak awal 2019, berkumpul 25 orang perempuan yang berinisiatif untuk mendirikan kelompok tani perempuan yang diberi nama *Kelompok Tani Perempuan Kharisma*. Sebelumnya perempuan petani ini tergabung dalam kelompok *credit union* (kelompok simpan pinjam) petani dan buruh tani perempuan.

Kelompok Tani Karisma ini merupakan salah satu strategi untuk membangun kemandirian petani, bukan hanya kemandirian ekonomi tapi juga sebagai ruang perlawanan dan rumah belajar bagi semua petani perempuan.

Perempuan petani berkeinginan punya organisasi sendiri, di mana feminis menjadi roh untuk membangun dan mengembangkan organisasi. Dengan adanya kelompok ini, mereka bercita-cita agar petani bisa mandiri dan berdaulat sebagai petani dengan kearifan lokal dan benih warisan leluhur sebagai karakteristik pertanian yang mereka kembangkan. Selain itu, perempuan petani berkeinginan



Kelompok Tani Perempuan Kharisma

membangun Padepokan Petani Perempuan agar mereka bisa punya ruang belajar dan ruang bersolidaritas juga bisa membangun kemandirian dan kedaulatan di tengah gempuran modernisasi pertanian yang menyingkirkan kearifan lokal, pengetahuan perempuan dan benih lokal mereka.

Bagi mereka mengembangkan dan melestarikan pertanian lestari adalah *tabungan* masa depan bagi generasi berikutnya, juga bagian dari menjaga keberlanjutan alam dan lingkungan. Mereka mengajak masyarakat untuk kembali pada konsep pertanian lestari sebagai warisan leluhur dan mengembangkan serta menggunakan benih-benih lokal yang ada. Dengan pertanian lestari lingkungan dan alam bisa dijaga keberlanjutannya juga agar lahan-lahan pertanian tidak tercemar dan terpapar bahan-bahan kimia yang merusak kesehatan.

Kelompok dengan anggota lintas agama ini berjalan dengan

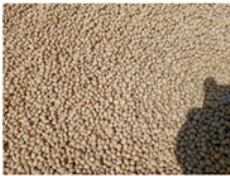
harmonis dan saling bertoleransi dalam menggairahkan kerja-kerja organisasi dengan kegiatan unggulan mereka KKO - TOP (Kebun Keluarga Organik – Tanam Olah dan Panen). Melalui KKO TOP ini, mereka memanfaatkan lahan-lahan pekarangan untuk menanam berbagai macam kebutuhan pangan keluarga, maupun untuk dijual jika kebutuhan sudah terpenuhi. Selain menanam di lahan pekarangan, hamparan lahan pertanian mereka juga tersebar di beberapa desa di Kulonprogo seperti Banjar Asri, Banjararum dan Sidoharjo. Beberapa jenis padi lokal mereka tanam adalah padi hitam, padi merah, Rajalele, Pandan wangi, Mentik Susu, Sri Kuning dan Bengawan juga ada kedelai lokal seperti Wilis dan Galunggung. Selain itu juga ada kecap organik, kacang hijau, VCO, minyak kelapa, gula semut, gula aren dan kerupuk Pati Telo.

Untuk pemasaran produk pertanian mereka, Bu Herni, salah satu inisiator kelompok Karisma menampung hasil pertanian dan membantu memasarkan kepada konsumen di berbagai wilayah seperti Kota Yogyakarta, Semarang bahkan di Jakarta. SP Kinasih juga memasarkan produk Karisma melalui *platform* Pasar Desa Lestari yang ada di media sosial seperti Facebook, Instagram dan twitter juga melalui grup-grup percakapan WhatsApp. Kelompok Karisma juga bekerja sama dengan salah satu LSM lokal di Yogyakarta untuk menyediakan 50 paket sembako setiap bulannya yang akan didistribusikan pada kelompok disabilitas yang ada di kota tersebut.

Hal menarik lainnya yang menjadi kegiatan kelompok Karisma adalah Solidaritas Pangan Perempuan yang diadakan setelah panen. Dalam kegiatan ini disajikan berbagai macam olahan pangan berbahan dasar hasil pertanian mereka. Mulai dari olahan singkong, beras, kacang-kacangan maupun olahan sayur yang disajikan bersamaan dan dinikmati bersama anggota kelompok. Solidaritas Pangan perempuan dilakukan secara berkala sebagai

wujud rasa syukur pada Tuhan atas berkah panen yang diberikan untuk menghidupi keluarga dan untuk berbagi. Untuk mendapatkan berkah dari sang pencipta, mereka harus menjaga dan melestarikan alam dan lingkungan, dalam hal ini adalah lahan-lahan pertanian mereka. Melalui Solidaritas Pangan Perempuan ini, selain saling berbagi pangan, mereka juga saling berbagi dan bertukar pengetahuan. Baik dalam mengolah hasil pangan maupun dalam memproduksi pangan.

Para petani di Karisma saling berbagi pengalaman dan pengetahuan tentang mengelola lahan pertanian mereka. Melalui pertanian lestari mereka memuliakan kembali benih-benih warisan leluhur seperti padi hitam Cempo, padi merah Andel, Mentik Susu, Mentik Wangi, Sri Kuning, Rojolele Gepyok. Selain padi juga ada kedelai wilis.



Kedele wilis



Mentik wangi



Mentik susu



Padi hitam Cempo



Padi Rojo Lele Gepyok



Padi merah Andel



Padi Sri Kuning

Selain memuliakan benih warisan leluhur mereka juga melestarikan kearifan lokal dalam mengelola dan mengolah hasil pertanian. Perempuan petani itu meyakini bahwa bertani secara lestari selain menjaga keberlanjutan dan kelestarian alam, juga bisa

menjaga keberlanjutan kesehatan mereka dan keluarga. Karena yang dikonsumsi adalah makanan yang sehat, yang bebas bahan-bahan kimia. Oleh sebab itulah maka pertanian lestari ini harus mereka pertahankan dan kembangkan. Upaya yang mereka lakukan untuk itu adalah mengedukasi anak-anak muda untuk mencintai dunia pertanian dan mau melanjutkan usaha pertanian yang dimulai oleh orang tua mereka.

Produk-produk pertanian lestari kelompok Karisma ini juga telah mendapatkan pasar yang cukup baik di pasar lokal maupun di luar Kulon Progo seperti Yogyakarta, Semarang bahkan Jakarta. Produk mereka juga dipasarkan melalui pasar desa lestari melalui berbagai platform media sosial yang difasilitasi oleh SP Kinasih. Produk-produk unggulan mereka adalah bermacam jenis beras organik seperti beras hitam, beras, beras, Mentik wangi, Mentik Susu, Beras Mutiara dan beras Rojolele.

Kelompok Lansia Produktif Ledhok Timoho

Kampung Ledhok Timoho secara administratif berada di Kelurahan Muja-Muju, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta. Kampung ini hadir karena adanya kebutuhan tempat tinggal oleh anak-anak jalanan dan korban penggusuran pada 20 tahun silam. Ledhok Timoho merupakan tanah Wedi Kengser yang berada di bantaran sungai Gajah wong dengan kemiringan lahan yang cukup curam. Hingga saat ini masyarakatnya masih berjuang untuk mendapatkan legalitas tanahnya agar tidak digusur sewaktu-waktu.

Kampung Ledhok Timoho adalah perkampungan miskin di kota Yogyakarta. Dikenal juga dengan kampung pemulung karena rata-rata penduduknya bekerja sebagai pemulung. Selain itu, juga ada yang menjadi penjual gorengan, Pekerja Rumah Tangga dan buruh harian lepas lainnya. Pandemi Covid yang melanda Indonesia memberikan dampak yang besar pada kehidupan

warga kampung Ledhok Timoho karena banyak dari mereka yang kehilangan pekerjaan atau tidak bisa melakukan pekerjaannya. Sejak awal tahun 2021 SP Kinasih mulai intens berkunjung ke sana dan melakukan penguatan bagi masyarakat kelompok untuk membangun gerakan kolektif dan kemandirian ekonomi.

Setelah berjalan beberapa waktu, mereka sepakat untuk membuat kebun kolektif di tanah terlantar milik salah satu warga. Tanah itu sebelumnya hanya sebagai tempat pembuangan sampah oleh masyarakat sekitar. Mereka bergotong royong membersihkan tanah tersebut. Memilah sampah-sampah plastik yang menumpuk. Kemudian mengolahnya, membuat bedengan-bedengan untuk ditanami berbagai sayuran seperti bayam, kangkung, terong dan lain-lain untuk memenuhi kebutuhan pangan keluarga. Hasil kebun ini juga bisa mereka jual kepada warga lainnya. Setiap minggunya kelompok sudah bisa mendapatkan Rp keuntungan Rp35.000 – Rp 50.000 hasil penjualan sayur-sayuran mereka.



Kebun Kolektif Lansia Produktif Ledhok Timoho

Bagi mereka membangun kebun kolektif juga bagian dari menata ruang dan menciptakan ruang terbuka hijau (RTH) bagi masyarakat Ledhok Timoho. Juga sebagai strategi untuk bertahan dan tidak digusur. Masyarakat Ledhok Timoho berkolaborasi dengan SP Kinasih dan ARKOM Jogja dalam membangun RTH yang responsif gender sebagai upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim karena perubahan iklim merupakan isu besar yang berkaitan dengan pemanasan global.

Program ini diharapkan menjadi contoh bagaimana mengintegrasikan perspektif gender dalam menyikapi perubahan iklim di perkotaan dengan memadukan konsep pertanian urban dan pariwisata yang bisa menunjang perekonomian masyarakat. Kebun kolektif juga menjadi bagian dari RTH ini. Di area ini juga ada 2 kolam untuk memelihara Lele dan ikan nila serta ikan mas. Anggota kelompok menyepakati waktu untuk bergotong royong membersihkan dan memelihara kebun mereka.

Sayur-sayuran yang ditanam ini, dijual pada anggota dan warga masyarakat sekitar dengan harga yang terjangkau. Hal ini sangat membantu warga memenuhi kebutuhan pangan keluarga. Hasil penjualan disimpan sebagai kas kelompok yang digunakan membeli kebutuhan berkebun. Selain itu, kas kelompok juga digunakan untuk rekreasi bersama anggota keluarga. Kebun kolektif ini telah memberikan manfaat bagi para lansia dan keluarganya yang tergabung dalam kelompok lansia produktif Ledhok Timoho.

Kegiatan yang dilakukan oleh lansia Ledhok Timoho mendapatkan perhatian dan dukungan dari Wakil Walikota Yogyakarta dengan mengunjunginya secara langsung dan merayakan Hari Tani bersama warga di sana. Wakil Walikota menyampaikan dukungannya pada warga agar mereka tetap bisa tinggal di Ledhok Timoho.

Sebagai kelompok dengan beragam latar belakang, dinamika dan persoalan tentu saja terjadi di antara mereka. Namun selalu ada penengah di antara untuk mengajak satu dengan yang lainnya mendiskusikan persoalan-persoalan yang terjadi di antara mereka. Mereka saling mengingatkan bahwa kelompok ini dibangun untuk kepentingan bersama, oleh sebab itu merekalah yang harus merawat dan mengembangkannya secara bersama.

Badan Usaha Kinasih

Solidaritas Perempuan Kinasih sejak awal tahun 2020 semakin serius mengelola usaha kemandirian ekonomi yang mereka beri

nama *Badan Usaha Kinasih* sebagai strategi *fundraising* juga semakin berkembang. Badan Usaha Kinasih sebagai media untuk mempromosikan dan memasarkan berbagai produk kelompok perempuan. Selain menjual produk kelompok perempuan, Badan Usaha Kinasih juga mengelola pengetahuan anggota. Anggota yang memiliki kapasitas dan keahlian dalam memfasilitasi, narasumber dan sebagainya akan memberikan kontribusi untuk organisasi dari jasa yang mereka terima. Jadi bisa diartikan bahwa Badan Usaha Kinasih bisa menjadi salah satu cara untuk menjaga keberlanjutan organisasi dan gerakan juga untuk memperpanjang nafas perjuangan.

Staf yang mengelola Badan Usaha Kinasih dalam sebuah perbincangan menyampaikan bahwa setiap bulannya SP Kinasih bisa mendapatkan keuntungan cukup baik dari penjualan produk kelompok perempuan, ditambah dengan kontribusi dari anggota yang menjadi fasilitator, atau narasumber serta kegiatan lainnya. Produk-produk kelompok perempuan ini dipromosikan dan dipasarkan melalui berbagai platform seperti Instagram(IG), twitter dan facebook dengan kemasan yang diberi nama Pasar Desa Lestari. Semakin hari produk-produk kelompok perempuan semakin diminati oleh banyak kalangan terutama produk kelompok perempuan Karisma Kulon Progo karena merupakan produk pertanian yang bebas bahan kimia dan sehat.

Sepenggal Cerita dari Bumi Tadulako

Gempa 7,4 SR yang disertai Tsunami dan Likuifaksi mengguncang dan menghantam Sulawesi Tengah pada 28 September 2018 di jam 17.30 WITA. Kota Palu, Sigi dan Donggala menjadi wilayah terdampak yang cukup parah. Bencana telah menghancurkan dan meluluhlantakan serta melumpuhkan perekonomian masyarakat kota Palu, Sigi, Donggala, dan sekitarnya. Infrastruktur, fasilitas umum, tempat ibadah dan ribuan rumah penduduk mengalami rusak berat sebagai dampak dari bencana ekologis ini. Ribuan orang

kehilangan tempat tinggal dan sumber penghidupan. Perempuan, anak-anak, lansia dan disabilitas umumnya mengalami trauma mendalam akibat kejadian ini.

Penanganan pasca bencana merupakan tahapan penting bagi para penyintas untuk memulihkan kehidupan dan perekonomian mereka. Solidaritas Perempuan Palu, mendampingi kelompok perempuan di beberapa desa di antaranya desa Pakuli, Langaleso dan desa Lambara untuk mendorong gerakan kolektif dalam memperjuangkan hak-hak mereka sebagai penyintas bencana juga mendampingi mereka dalam mengembangkan potensi yang dimiliki menuju kemandirian ekonomi.

Kelompok Perempuan Desa Lambara Sigi

Desa Lambara merupakan salah satu desa di Kabupaten Sigi yang merupakan wilayah asal buruh migran terbanyak di Sulawesi Tengah, khususnya buruh migran perempuan. Pasca bencana gempa dan tsunami serta likuifaksi yang disusul dengan bencana pandemi Covid telah mengguncang perekonomian masyarakat desa Lambara. Mereka belum sepenuhnya bisa menata kehidupan dengan baik pasca bencana, baik untuk mendapatkan bantuan rehabilitasi rumah dan *livelihood*, pandemi covid datang mengguncang pondasi kehidupan yang mulai mereka bangun. Mereka yang sedang bekerja di luar negeri terpaksa dipulangkan, yang sudah bersiap bekerja ke luar negeri terpaksa ditunda keberangkatannya sampai situasi membaik.

Desa Lambara merupakan salah satu desa yang menjadi fokus Solidaritas Perempuan Palu terutama untuk isu buruh migran. SP Palu sudah membangun Kerjasama dengan perempuan akar rumput di desa Lambara jauh sebelum terjadinya gempa dan tsunami yang menghantam Sulawesi Tengah. Mantan buruh migran maupun

keluarganya rutin melakukan diskusi-diskusi bersama SP Palu untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang migrasi yang aman. Setelah bencana gempa dan tsunami, mereka berdiskusi tidak hanya hanya terkait persoalan buruh migran dan migrasi tapi juga mendiskusikan upaya-upaya untuk memulihkan perekonomian mereka pasca bencana.

Situasi inilah yang melatarbelakangi lahirnya kelompok kemandirian ekonomi perempuan desa Lambara. Kelompok ini dibangun sebagai ruang aman, ruang nyaman, ruang belajar dan ruang untuk membangun gerakan kolektif untuk memperjuangkan kehidupan perempuan yang lebih baik. Hal ini senada dengan upaya Perserikatan Solidaritas Perempuan (PSP) untuk mengembangkan Feminis Ekonomi Solidaritas (FES) dengan tujuan untuk membangun kemandirian perempuan baik kemandirian ekonomi maupun kemandirian dalam kehidupan lainnya dengan semangat kolektivitas karena FES yang dikembangkan oleh PSP bukan hanya bertujuan untuk meningkatkan ekonomi, tapi lebih dari itu juga sebagai ruang aman, ruang belajar dan alat perjuangan bagi Perempuan.

Pertengahan 2019, terbentuklah kelompok kemandirian ekonomi perempuan desa Lambara yang diberi nama *Mombela Sigi (Mombine Belota Pura Lambara Sigi)* yang berarti *kelompok perempuan untuk kebaikan kita bersama*). Anggota kelompok ini sebagian besar mantan buruh migran atau anggota keluarganya, namun juga ada perempuan desa Lambara lainnya yang tidak pernah menjadi buruh migran atau keluarga buruh migran. Bersama SP Palu, mereka membangun dan mengembangkan kemandirian ekonomi yang sesuai dengan konsep FES yang dikembangkan PSP. Mereka mulai mengidentifikasi dan memetakan potensi dan pengetahuan yang mereka miliki sebagai modal untuk mengembangkan kemandirian

ekonomi.

Berdasarkan potensi yang mereka miliki, lalu mereka mengembangkan produk berbahan dasar pisang karena pisang sangat banyak di desa mereka. Rata-rata setiap rumah memiliki pohon pisang. Kelompok Mombela mengawalinya dengan membuat keripik pisang dengan berbagai varian rasa. Pada Maret tahun 2020 kelompok Mombela Sigi mengikuti pelatihan membuat tepung pisang yang difasilitasi oleh Dinas Pemberdayaan perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP2KB) dan dinas Sosial kabupaten Sigi. Setelahnya mereka mulai membuat berbagai jenis makanan berbahan dasar pisang atau tepung pisang seperti stik, aneka ragam kukis, bolu dan brownies.

Setelah mengikuti kegiatan-kegiatan kelompok, banyak kemajuan dan hal baik yang dirasakan oleh perempuan, di antaranya mereka semakin berani berbicara dan menyuarakan kepentingannya. Mereka sudah diberi ruang dan dilibatkan dalam rapat-rapat di pengambilan keputusan di desa. Suara mereka mulai didengar dan diperhitungkan, baik dalam keluarga maupun dalam kehidupan bermasyarakat. Mereka makin percaya diri tampil di publik, tidak hanya di desa Lambara tapi juga dalam forum-forum yang lebih luas seperti menjadi narasumber dalam workshop dan training, baik yang dilaksanakan oleh Solidaritas Perempuan maupun organisasi masyarakat sipil lainnya di Palu atau di level nasional.

Teras Kopi Soliper untuk Merajut Solidaritas – SP Sintuwu Raya Poso

Solidaritas Perempuan Komunitas Sintuwu Raya Poso, sejak tahun 2018 telah mulai mengembangkan usaha kemandirian ekonomi dengan memanfaatkan teras kantor sebagai kedai kopi yang diberi nama Teras Kopi Soliper. Teras Kopi Soliper sempat terhenti

di masa pandemi covid, namun tahun 2021 mulai menggeliat lagi dengan mengembangkan makanan lokal sebagai merek produknya, seperti Binte, ikan katombo, pisang goreng, kopi kampung dan aneka menu lokal lainnya.

Teras Kopi Soliper dibuat sebagai upaya untuk menyokong pendanaan organisasi dan menambah *income* bagi pengurus, staf dan volunteer di SP Sintuwu Raya. Teras Kopi Soliper ini juga sebagai ruang diskusi untuk merancang dan mengembangkan gagasan untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat yang mengalami penindasan.⁸

Di Teras Kopi tidak ada dominasi dan monopoli oleh siapapun karena kepemilikannya adalah kolektif di mana nilai-nilai feminis menjadi titik tumpunya. Kehadiran Teras Kopi sudah dirasakan manfaatnya oleh mereka yang bekerja maupun oleh komunitas SP Sintuwu Raya Poso. Dengan pengelolaan yang baik dan transparan, Teras Kopi Soliper bisa menambah penghasilan aktivis SP Sintuwu Raya juga bisa menjaga keberlanjutan organisasi dan memperpanjang nafas gerakan perlawanan.



Teras Kopi Soliper

ruang diskusi, ruang belajar dan ruang untuk memperkuat gerakan

⁸Evani Hamzah, 28 November 2022

bagi perempuan atau masyarakat kota marjinal. Teras Kopi Soliper diproyeksikan sebagai etalase untuk mempromosikan dan memasarkan produk perempuan akar rumput. Teras Kopi Soliper dikelola bukan hanya untuk promosi dan pemasaran produk kelompok perempuan, tapi juga menjadi etalase pengetahuan perempuan yang merupakan kekayaan intelektualitas mereka sebagai modal untuk mengembangkan potensi yang dimiliki.



BAGIAN IV

FEMINIS EKONOMI SOLIDARITAS UNTUK KEBERLANJUTAN





Pasca Reformasi tahun 1998, sistem ekonomi kerakyatan mulai menjadi perbincangan banyak kalangan dan mulai berkembang di Indonesia. Pemerintah menyikapinya dengan mengeluarkan ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPR/1999, tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara yang menyatakan bahwa sistem perekonomian Indonesia yaitu sistem ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada pasar yang berkeadilan, mengikutsertakan seluruh lapisan masyarakat dalam proses pembangunan dan berlaku adil bagi seluruh rakyat.

Konsep ekonomi kerakyatan ini merupakan salah satu sistem perekonomian yang digagas oleh Muhammad Hatta. Lahirnya konsep ini dilatarbelakangi oleh adanya keterpurukan perekonomian yang dialami oleh bangsa Indonesia diawal kemerdekaan. Saat terjadi krisis moneter tahun 1997 yang menyebabkan hancurnya perekonomian Indonesia, pelaku ekonomi yang mengusung konsep ekonomi kerakyatan masih mampu berdiri tegak dengan prinsip gotong-royong dalam membangun dan mengembangkan perekonomian dengan semangat kolektivitas. Konsep ekonomi ini harus dilakukan dengan humanis dan berkeadilan dengan terbebas dari persaingan bebas, monopoli dan penindasan manusia satu dengan yang lainnya.

Kemudian bermunculannya berbagai program untuk meningkatkan ekonomi masyarakat berbasiskan pemberdayaan diluncurkan oleh pemerintah seperti KUR (Kredit Usaha Rakyat), PNPM (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat) dan berbagai program melalui SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) mulai dari kabupaten/kota, Provinsi maupun di level nasional yang

bertujuan membantu permodalan untuk masyarakat. Selain yang diinisiasi oleh pemerintah di masyarakat sendiri juga bermunculan Lembaga keuangan mikro atau yang lebih dikenal dengan istilah koperasi dengan bentuk koperasi simpan pinjam (CU/*Credit Union*), koperasi sarana tani, koperasi benih dan sebagainya, namun orientasinya masih terpaku pada peningkatan finansial anggota, belum sebagai alat perjuangan bersama untuk keluar dari ketertindasan ekonomi liberal yang dikuasai penguasa atau pemodal. Program-program tersebut justru diprakarsai oleh aktor-aktor global yang memiliki kepentingan di Indonesia, di antaranya untuk mengintervensi negara melahirkan kebijakan-kebijakan yang melindungi investasi dari pemodal. Berbagai kebijakan dan proyek yang dilahirkan Negara dengan dorongan Bank Dunia, maupun Bank Pembangunan Asia, telah menghasilkan pemiskinan. Sementara, program-program seperti PNPM tidak pernah bisa mengatasi kemiskinan struktural yang mereka hasilkan.

Saat ini masih banyak koperasi dengan orientasi pasar dan peningkatan keuntungan yang akhirnya memunculkan persaingan antar anggota, di mana ikatan solidaritas dan demokrasi belum menjadi faktor utama. Walaupun konsep ekonomi yang digadagadang mengatasmakan ekonomi kerakyatan. Karena Indonesia adalah negara demokrasi maka selayaknya sistem ekonomi yang diusung juga berlandaskan prinsip demokrasi dengan menjadikan rakyat sebagai subjek utama dalam pembangunan dan pengembangan ekonomi. UUD 1945 pasal 33 secara tegas menyatakan prinsip demokrasi ekonomi yang harus dijunjung tinggi diantaranya prinsip kebersamaan, efisien, berkeadilan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.¹

¹<https://www.google.com/search?q=Konsep+ekonomi+kolektif&oeq=Konsep+ekonomi+kolektif&aqs=chrome..69i57j33i160.10272j0j9&sourceid=chrome&ie=UTF-8>

Sejatinya, pengembangan dan pembangunan ekonomi berdasarkan kebutuhan, potensi dan kearifan lokal yang dimiliki oleh masyarakat dalam suatu wilayah, bukan hanya mengejar peningkatan ekonomi semata, tapi juga sebagai alat juang untuk mempertahankan kedaulatan dan solidaritas serta mampu mengakomodir kebutuhan dan kepentingan masyarakat termasuk perempuan. Selain itu pembangunan dan pengembangan ekonomi haruslah mampu menjaga kelestarian ekologi, budaya dan sistem sosial yang ada. Pembangunan dan pengembangan ekonomi haruslah berbasis pada potensi lokal dan kearifan yang ada di masyarakat sebagai upaya untuk mendukung pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat di komunitasnya dengan cara yang tidak rakus dan bijaksana demi kelestarian alam dan lingkungan, sekaligus.

Sebagai organisasi yang bekerja bersama perempuan di tingkat tapak, Perserikatan Solidaritas Perempuan pada kongres VII tahun 2015 di Yogyakarta memandatkan organisasi untuk mengembangkan kemandirian ekonomi sebagai upaya untuk memperkuat Perempuan, sekaligus menjadi bagian dari perjuangan perempuan secara kolektif. Pengembangan ekonomi yang dikembangkan ini diharapkan tumbuh secara natural sesuai potensi yang dimiliki, pengetahuan perempuan serta kearifan lokal yang berkembang secara turun temurun di wilayah mereka serta modal sosial yang hidup dan bertumbuh secara alamiah di mana perempuan adalah penggerak utamanya. Karenanya, ekonomi yang dikembangkan bukanlah sekedar ekonomi tanding, melainkan justru mengumpulkan dan memulihkan pengetahuan serta praktik-praktik ekonomi perempuan yang selama ini disingkirkan dan dihancurkan oleh sistem kapitalisme.

Kegiatan kemandirian ekonomi harus diarahkan dan dikembangkan secara kolektif sebagai alat perlawanan untuk melawan

konsep ekonomi kapitalis yang memiskinkan dan meminggirkan perempuan dari ruang-ruang hidup dan kehidupannya. Gerakan kemandirian ekonomi kolektif ini juga sebagai ruang belajar bagi perempuan karena melalui kegiatan ini diharapkan perempuan bisa mengembangkan potensi dirinya sehingga akan terlahir pemimpin-pemimpin perempuan di komunitas, yang kritis terhadap pemerintah sebagai pengemban amanat konstitusi yang berkeadilan.

Berangkat dari pengalaman-pengalaman baik kelompok perempuan di komunitas, Solidaritas Perempuan memperkenalkan konsep Feminis Economy Solidarity (Solidaritas Ekonomi Feminis) yaitu gerakan kolektif membangun kemandirian kelompok perempuan termasuk kemandirian ekonomi. FES juga sebagai ruang aman, ruang belajar sesama perempuan dan alat perjuangan di mana feminis menjadi nilai dasar dan titik tumpu. FES menjadi konsep yang tepat untuk dikembangkan oleh semua entitas SP karena FES bisa menjadi strategi perlawanan atas politik ekonomi global yang memiskinkan perempuan.

Feminis Ekonomi Solidaritas adalah perlawanan terhadap ekonomi kapitalis karena dalam membangun dan mengembangkan FES, uang bukanlah modal dan tujuan utamanya. Feminis Ekonomi Solidaritas juga bisa sebagai strategi pengorganisasian dalam memperkuat gerakan kolektif dan solidaritas untuk sebuah perjuangan. Kontribusi untuk kelompok dari usaha produktif yang dikembangkan digunakan untuk memperpanjang nafas perjuangan mereka dalam merebut dan mempertahankan hak-hak mereka yang dirampas. Gerakan ini juga sebagai upaya untuk menjaga keberlanjutan sebuah organisasi.

Sebagai sebuah konsep tanding ekonomi kapitalis, dalam FES terkandung tiga elemen dasar yang tak terpisahkan yakni Feminis, Solidaritas dan Ekonomi. ***Feminis*** merupakan sebuah kesadaran

akan adanya ketidakadilan yang terjadi baik itu karena praktik budaya patriarki, interpretasi agama, maupun kebijakan dan mekanisme negara yang mengakibatkan terjadinya ketidaksetaraan dan ketimpangan relasi antara laki-laki dan perempuan terhadap akses dan kontrol dalam pengelolaan sumber daya alam atau akses untuk berbagai kehidupan sosial lainnya. Bahwa ketidakadilan dan ketidaksetaraan ini harus dilawan, itulah hakikat dari kesadaran feminis.

Solidaritas adalah rasa yang menghubungkan antar individu berdasarkan kepentingan bersama. Solidaritas tak mengenal batas, karena makin banyak keberagaman yang terintegrasi maka solidaritas semakin tinggi. Solidaritas bisa lahir karena adanya rasa seperiasaan yang menghadirkan rasa bahwa satu adalah bagian dari yang lain, sehingga “saya” kemudian menjadi “kami.” Dalam Solidaritas juga ada rasa sepenanggungan, setiap orang atau individu sadar perannya dalam kelompok tersebut dan peran itu adalah sebuah tanggung jawab yang harus dijalankan demi kepentingan bersama. Selain itu juga ada rasa saling membutuhkan, di mana setiap individu merasakan saling membutuhkan dan saling keterhubungan antara satu dengan yang lainnya.

Ekonomi dimaknai dengan kemandirian ekonomi, yaitu salah satu upaya untuk meningkatkan pendapatan kelompok atau perempuan dalam mendukung pemenuhan kebutuhan keluarga juga salah satu cara untuk mendukung perjuangan mereka dalam merebut kedaulatannya. Prinsipnya ketika kelompok atau perempuan berdaya secara ekonomi, maka mereka juga mempunyai keberdayaan dan kedaulatan untuk mengambil keputusan atas hal-hal yang berhubungan dengan kepentingan kehidupan perempuan. Dengan berdaya secara ekonomi perempuan juga bisa memiliki otonomi atas tubuhnya karena perempuan tidak tergantung pada

laki-laki atau pihak lain untuk kehidupannya. Otonomi atas tubuh akan memangkas penindasan dan ketidakadilan terhadap perempuan. FES merupakan salah satu cara bagi perempuan atau kelompok perempuan untuk keluar dari situasi kekerasan sekaligus membangun dan mengembangkan kemandirian berbasis potensi, pengetahuan dan pengalaman perempuan serta kearifan lokal dimana nilai-nilai feminis menjadi perekat antar individu.

FES tidak hanya berorientasi pada penguatan ekonomi saja tapi juga bertujuan untuk membangun dan memperkuat gerakan kolektif untuk sebuah perjuangan. Emile Durkheim, sosiolog Prancis yang hidup antara tahun 1858-1917 menyebutkan bahwa, “melalui representasi kolektif, kita mendapatkan konsepsi tentang diri, tentang orang lain, dan tentang relasi kita dengan lingkungan, di mana menjaga keseimbangan dengan alam semesta menjadi hal yang penting dalam sebuah gerakan kolektif. Gerakan kolektif kemandirian ekonomi selain sebagai ruang aman juga bisa sebagai ruang untuk menempa diri dan meningkatkan kapasitas, juga sebagai alat politik untuk merebut ruang-ruang strategis dalam pengambilan keputusan baik di ranah domestik maupun publik.

Melalui FES yang salah satunya diejawantahkan dalam kemandirian ekonomi kelompok perempuan diharapkan bisa mengubah ketimpangan relasi di antara perempuan itu sendiri, maupun, perempuan dengan suami, perempuan dan laki-laki, perempuan dan lingkungan serta perempuan dan pemerintah. Karena dengan kemandirian ekonomi, perempuan bisa melepaskan diri dari ketergantungan yang melekat pada siapapun sehingga perempuan bisa otonom dalam pengambilan keputusan.

Beberapa hal yang mendasari mengapa penting membangun dan mengembangkan kemandirian ekonomi di komunitas sebagai sebuah bentuk perlawanan terhadap ekonomi yang kapitalis adalah:

1. Semakin masifnya pembangunan ekonomi yang berorientasi pasar yang menjadikan perempuan semakin jauh dari akses dan kontrol atas sumber ekonominya sehingga memunculkan feminisasi kemiskinan (kemiskinan berwajah perempuan), di mana mayoritas kantong-kantong kemiskinan di setiap wilayah di Indonesia diisi oleh perempuan dan anak.
2. Derasnya arus politik ekonomi global yang menggunakan kekuatan politik yang otoriter, berwatak kekerasan, dan eksploitatif dan tidak ramah perempuan yang mengakibatkan terancamnya keamanan dan kesejahteraan hidup perempuan
3. Menguatnya dukungan negara bagi kapitalis untuk mengambil alih hak-hak perempuan atas pengelolaan sumber hidupnya dan menjadikan perempuan di komunitasnya harus mencari cara untuk membangun kemandirian ekonominya.
4. Kemandirian ekonomi kelompok atau komunitas menjadi penting untuk memperpanjang nafas perlawanan dan menjaga keberlanjutan organisasi yang berorientasi pada keberlanjutan ekologi.

Dalam praktiknya Feminis Ekonomi Solidaritas yang dikembangkan oleh Solidaritas Perempuan harus sesuai dengan nilai dan prinsip organisasi seperti:

1. Tidak meninggalkan siapapun di belakang, karena tujuan utama FES bukanlah menjadikan individu kuat dan berdaya sendiri, namun mendorong lahirnya kekuatan kolektif di komunitas.
2. Berperspektif Feminis, di mana nilai-nilai feminis terinternalisasi dalam setiap gerak dan strategi yang diambil.
3. Berorientasi pada keberlanjutan ekologi.
4. Berorientasi pada penguatan kelompok marginal khususnya

perempuan.

5. Partisipatif, di mana keterlibatan semua anggota dalam setiap perencanaan dan pengambilan keputusan adalah hal yang penting.

Feminis Ekonomi Solidaritas merupakan strategi bagi Solidaritas Perempuan untuk mendorong lahirnya gerakan kolektif dan memperkuat gerakan perlawanan untuk merebut kembali kedaulatan perempuan. Melalui FES ini juga diharapkan terwujudnya kehidupan perempuan yang lebih adil dan setara dalam segala aspek kehidupan. Melalui FES diharapkan dapat:

1. Membantu perempuan untuk membangun dan mengembangkan usaha ekonomi sehingga mereka bisa berkontribusi dalam perjuangan dan advokasi di komunitasnya.
2. Kelompok perempuan bisa memiliki dukungan dan kemandirian finansial untuk perjuangan
3. Menjadi pengikat gerakan kolektif
4. Sebagai wadah bagi perempuan untuk berani bersuara, mengeluarkan ide dan teribat dalam ruang pengambilan keputusan.

Dari paparan di atas, Solidaritas Perempuan merasa penting agar kelompok-kelompok perempuan juga komunitas membangun dan mengembangkan kemandirian ekonomi sebagai upaya untuk menjaga keberlanjutan organisasi, juga memperkuat kerja-kerja advokasi dalam memperjuangkan keadilan dan kesetaraan bagi semua makhluk di bumi nusantara yang kita cintai ini. Kemandirian ekonomi yang dikembangkan dengan konsep Feminis Ekonomi Solidaritas juga sebagai sebuah strategi untuk melawan politik ekonomi global yang meminggirkan dan memiskinkan perempuan



BAGIAN V

MERAWAT INISIATIF, MENGUATKAN PERLAWANAN





FES tidak hanya menjadi inisiatif melainkan menjadi gerakan bagi perempuan akar rumput yang tengah berlawanan. Dalam perjuangan perempuan, tentunya tidak bisa dipisahkan antara gerakan politik dan gerakan ekonomi. FES telah memberikan pembelajaran bagaimana keduanya perlu berjalan beriringan dan mendukung satu sama lain. Dari pengalaman kelompok perempuan kita belajar bahwa kemandirian ekonomi yang dibangun dapat berdampak pada penguatan posisi politik perempuan, dan mendorong terbukanya ruang-ruang keterlibatan perempuan di dalam forum-forum pengambilan keputusan. Di sisi lain, kita tentu menyadari bahwa gerakan politik juga dapat mendorong kesempatan-kesempatan bagi perempuan dan masyarakat untuk dapat mengembangkan kemandirian ekonomi yang bersumber dari pengetahuan dan kearifan lokal.

Patriarki yang termanifestasi di dalam kebijakan-kebijakan ekonomi dan pembangunan, telah menghasilkan pemiskinan dan semakin berlapisnya struktur kuasa yang menindas perempuan. Perempuan kehilangan kedaulatannya tidak hanya atas tubuh, pikiran dan ruang gerak, tetapi juga dicabut dari ruang hidup dan sumber-sumber kehidupannya. Pencerabutan itu juga turut menghilangkan pengetahuan, nilai sosial, budaya, pun nilai-nilai spiritual yang selama ini dirawat dan dilestarikan oleh perempuan dan komunitasnya secara turun menurun. Ekonomi dan pembangunan yang demikian, semakin menghilangkan kuasa dan kedaulatan perempuan dalam berhadapan dengan negara, masyarakat, maupun keluarganya. Karenanya, perlawanan terhadap patriarki adalah upaya pemulihan terhadap peran, pengetahuan, dan posisi penting perempuan, tidak terkecuali di dalam perekonomian.

FES dikembangkan untuk mengembalikan kuasa perempuan tersebut, dengan menggali dan mempraktikkan sistem ekonomi yang berasal dari pengetahuan dan pengalaman perempuan, yang selama ini disingkirkan oleh kapitalisme dan budaya patriarki.

Saat ini, beberapa bentuk inisiatif FES yang telah terbangun telah memberikan banyak pembelajaran penting. Pengembangan FES tentu tidak terlepas dari berbagai tantangan, di mana nilai-nilai feminis dan solidaritas menjadi pegangan yang menjaga gerakan ini tetap ada. Karenanya, disadari bahwa pengembangan dan penguatan masih perlu terus dilakukan, sehingga FES dapat menjadi gerakan yang berdampak lebih luas, tidak hanya untuk kelompok perempuan, tetapi juga dalam melawan sistem ekonomi negara yang patriarkis dan kapitalistik. FES terus mencari bentuk, berproses dan bertumbuh bersama Solidaritas Perempuan, melalui berbagai praktik, dan refleksi, dengan tetap menjaga konsistensi terhadap nilai-nilai feminis yang sejak awal menjadi dasar dalam membangun FES itu sendiri. FES diharapkan menjadi sebuah kontribusi bagi kita yang percaya bahwa dunia yang berbeda, di mana kita bisa berbagi sumber daya secara adil dan setara adalah mungkin untuk diwujudkan.



**Jln. Jatisari No 12A, RT.005/ RW.007, Jati Padang. Pasar Minggu, Jakarta Selatan,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 12540**



(021) 22788677



soliper@cetrin.net.id



[Soliper_SP](https://twitter.com/Soliper_SP)



[Solidaritas Perempuan](https://www.facebook.com/SolidaritasPerempuan)



[solidaritasperempuan](https://www.instagram.com/solidaritasperempuan)



[solidaritasperempuan](https://www.youtube.com/solidaritasperempuan)